



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1430 /Pdt.G
/2020/PA.Pbr TENTANG KDRT BERDASARKAN UU
NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA
KELAS 1 A KOTA PEKANBARU
TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Hukum Islam (M.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

NUR ZABIAH
NIM. 21890225369

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : NUR ZABIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21890225369
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN
HUKUM ISLAM (Studi Analisis putusan perkara Nomor
1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Kelas 1
A Pekanbaru tahun 2020) KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM (Studi Analisis
putusan perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr di
Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru tahun 2020)

Tim Penguji:

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag
Penguji I/Ketua

Dr. Afiq Budiawan, MH
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
Penguji III

Dr. Hertina, M.Pd
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

05/05/2021



PENGESAHAN PENGUJI

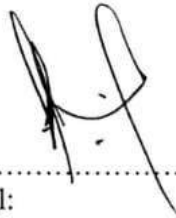
Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Aalisis Putusan Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr) tentang KDRT Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Nur Zabiah
NIM : 21890225369
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 05 Mei 2021.

Penguji I

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007


.....
Tgl:

Penguji II

Dr. Hj. Hertina, M.Pd
NIP. 196806291994022002

.....
Tgl:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani. M.Ag
NIP. 197204271998031002



PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT PASAL 1 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Tahun 2020)”**, yang di tulis oleh saudari :

Nama	: Nur Zabiah
NIM	: 21890225369
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentras	: Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 08 Maret 2021

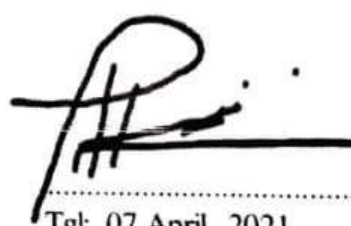
Pembimbing I

Dr. Zukayandri, M.Ag.
NIP. 197101051995031002


Tgl: 07 April 2021

Pembimbing II

Dr. Azni, M.Ag.
NIP. 197010102007011051


Tgl: 07 April 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
NIP. 19670822 199803 1 001



Dr. Zulkayandri, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Nur Zabiah

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum WrWb

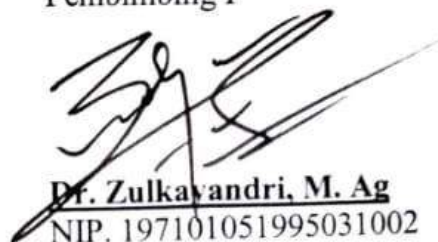
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Nur Zabiah
NIM	: 21890225369
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Kekerasan Fisik Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Perceraian (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 09 Maret 2021
Pembimbing I



Dr. Zulkayandri, M. Ag
NIP. 197101051995031002



Dr. Azni, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Nur Zabiah

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Nur Zabiah
NIM	: 21890225369
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul	: Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Pasal 1 Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Tahun 2020)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 07 April 2021
Pembimbing II

Dr. Azni, M. Ag
NIP. 197010102007011051



SURAT PERNYATAAN


Nama : Nur Zabiah
 NIM : 21890225369
 Tempat/tanggal lahir : Kampung Salak, 28 Agustus 1995
 Program studi : Hukum Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **Aalisis Putusan Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr) tentang KDRT Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar megister pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Agustus 2021




Nur Zabiah
 Nim: 21890225369



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur hanya kepada Allah SWT. Shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada nabi Muhammad Saw. Sebagai manusia Rahmatan lil 'alamin.

Pokok-pokok yang tertuang dalam tesis berjudul; judul **“ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr TENTANG KDRT BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM DI PA KOLAS 1 A KOTA PEKANBARU”** disusun dengan bantuan berbagai pihak.

Dengan telah menyelesaikan tesis ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga terselesainya tesis ini yaitssu kepada :

1. Terimakasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, materil, serta do'a. Ayahanda Tercinta Najamuddin Nasution, Ibunda tercinta Susyanni Siregar dan Suami tercinta Muhammad Yasrimar, SH. MH.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M, Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku ketua Prodi Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan bimbingan nasehat terbaik selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Zulkayandri M.A selaku Pembimbing I Dalam penulisan Tesis.
6. Bapak Dr. Azni, MA selaku Pembimbing II Dalam Penulisan Tesis.
7. Bapak/ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Segenapa teman-teman, sahabat, guru-guru yang selalu mensupport dalam penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Ilahi serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penyusun sendiri. Penyusun mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kemaslahatan tesis ini.

Pekanbaru, 17 Juli 2021
Penulis,

NUR ZABIAH
NIM : 21890225369



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN PENGUJI (KOP PASCASARJANA)

PENGESAHAN PENGUJI

PENGESAHAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN KETUA PRODI

NOTA DINAS PEMBIMBING 1

NOTA DINAS PEMBIMBING 2

SURAT PENYATAAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....vi

ABSTRAK TESIS.....x

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Penegasan Istilah.....8

C. Identifikasi Masalah.....9

D. Batasan Masalah.....10

E. Rumusan Masalah.....10

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....11

1. Tujuan Penelitian.....11

2. Manfaat Penelitian.....11

G. Kajian Relevan.....12

H. Sistematika Penulisan.....14

BAB II PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ISLAM16

A. Putusan Hakim.....16

1. Pengertian Putusan Hakim.....16

2. Dasar Hukum Putusan Hakim.....17

3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....19

B. Perceraian dalam Islam.....23

1. Pengertian perceraian.....23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar hukum perceraian.....	25
3. Syarat dan rukun talak	29
4. Macam-macam talak.....	31
5. Hikmah talak.....	32
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
2. Bentuk-bentuk Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
3. Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
D. Pengadilan Agama	43
1. Pengertian Pengadilan Agama	43
2. Sejarah Pengadilan Agama	44
3. Wewenang Pengadilan Agama	49
E. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	51
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	51
2. Tata tertib Pengadilan Agama.....	60
3. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	61
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama	61
5. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru.....	65
6. Tinjauan Tentang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	68
7. Alasan-alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Jenis penelitian	82
B. Sumber data.....	84
C. Teknik Pengumpulan data	86
D. Teknik analisis data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru tentang kasus perceraian disebabkan kekerasan.....	89
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam	99

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.Ana
 lisis terhadap putusan perkara nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr.....107

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN113

- A. Kesimpulan.....113
- B. Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Singkatan		Kepanjangan dari kata
1	swt		Subhanahu wa Ta'ala
2	saw		Shallallahu 'Alaihi Wasallam
3	as		'Alaihissalam
4	Q.S		al-Qur'an Surat
5	h		Halaman
6	t. pn		Tanpa Penerbit
7	t. np		Tanpa tempat penerbit
8	t.t		Tanpa tahun penerbit
9	W		Wafat
10	H.R		Hadits Riwayat
11	r.a		Radiyallahu Anhu

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKM) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/U1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide To Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

16	ط	Th
17	ظ	Zh
18	ع	,
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	,
29	ي	Y

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misalnya ل idajnem *qala*

Vokal (i) panjang = i misalnya ل idajnem *qila*

Vokal (u) panjang = u misalnya نودmenjadi *duna*

Khusus untuk bacaan *ya nisbat*, maka tidak boleh digantikam dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya nisbat* diakhirnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Contoh :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ idajnem qawlun

Diftong (a) = ي misalnya خَيْرٌ idajnem khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تِلْكَ رِيسَالَةٌ مُدَرِّسَةٍ menjadi *al-risalat Li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زَكَاةً أَوْ كَاتِلًا ditulis *Zakat al-Mal*.

D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terketak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

- a. Al-Imam al-Bukhari mengatakan....
- b. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun.

Pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.¹

¹Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiah , t.th), jilid.3. hal. 220



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Zabiah (2021)

: “Analisis Putusan Perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA. Pbr Tentang KDRT Berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam di PA Kelas 1 A Kota Pekanbaru”

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang didapat melalui penelusuran berkas perkara perceraian, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anggota keluarga tentang hak dan kewajiban serta batasan-batasan diperbolehkan tidaknya melakukan kekerasan dalam keluarga. Serta kurangnya pengetahuan tentang aturan baik perundang-undangan dan atau hukum Islam tentang kekerasan ini sehingga banyak pelaku kekerasan yang bebas melakukannya tanpa dikenakan sanksi, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan putusan perkara Nomor: 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Undang-undang dan hukum positif, mengetahui hasil putusan Pengadilan Agama, mengetahui korelasi putusan Pengadilan Agama Nomor Putusan Pengadilan Agama terhadap kasus perceraian pada berkas perkara nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr dengan Undang-Undang dan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti di lapangan. Sumber data berupa dokumen atau berkas perkara perceraian Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr dan sumber-sumber lain dari berbagai literatur seperti buku-buku, Undang-Undang dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Teknik analisis dilakukan dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah semua data, mempelajari dan menyusunnya.

Adapun hasil penelitian yaitu segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dilarang baik dalam Islam maupun Undang-Undang. Oleh karena itu ada sanksi tegas bagi pelaku tindak kekerasan. Dalam hal memutuskan sebuah perkara perceraian di Pengadilan Agama, hakim melalui proses panjang dan banyak pertimbangan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam sehingga melahirkan putusan perkara yang isinya menjelaskan semua kejadian, penyebab, saksi, bukti dan hasil akhir sebuah perkara. Setelah menganalisis putusan perkara nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr dalam memutuskan perkara, maka benar hakim mengacu kepada Undang-undang dan hukum Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

نور زابية (2021) : "تحليل قرار القضية رقم 1430/ف.د.ت.ك/2020/ب.أ. ف.ب.ر. عن العنف المنزلي بناءً على القانون رقم 23 عام 2004 والقانون الإسلامي في ب.أ. مستوى 1 أ مدينة بكنبارو"

خلفية هذا البحث كثرة الطلاق بسبب العنف المنزلي الذي اكتشف ذلك من خلال ملفات قضية الطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، أن الأسباب لهذا الظلم هي نقصان المعرفة عن الحقوق والواجبات لدى الزوج والزوجة ونقصان معرفتهما عن حدود التحذير في تدبير الأسرة، والجهل عن القانون الحكومي والقانون الإسلامي عن حكم العنف. ولهذا يشعر العانف حُرًا بريئًا بما فعل من الظلم دون أيِّ عقابٍ حتى لا يؤثر رداعا عليه. بناءً على قرار القضية رقم : 1430/ف.د.ت.ك/2020/ب.أ. ف.ب.ر.

وأما أهداف هذا البحث فهي معرفة العنف المنزلي المستعرض من خلال القوانين الحكومية، ومعرفة قرار القضية لمحكمة الشؤون الدينية، ومعرفة الارتباط بين قرار محكمة الشؤون الدينية وقضية الطلاق في ملفات القضية رقم : 1430/ف.د.ت.ك/2020/ب.أ. ف.ب.ر. بالقوانين الإيجابية والقوانين الإسلامية.

يقام هذا البحث باستخدام الطريقة الكيفية الوصفية، وهو بحث يهدف إلى التصوير وتوصيف موضوع البحث وظواهر المبحوث. مصدر البيانات لهذا البحث الوثائق أو ملفات قضية الطلاق رقم 1430/ف.د.ت.ك/2020/ب.أ. ف.ب.ر. والمصادر الأخرى من التراث كالكتب، والقوانين وغيرها من المصادر التي لها ارتباط بهذا البحث. وحُلِّلت البيانات من خلال مراجعتها بدءاً من مطالعة كل البيانات، وتأكيدها، وترتيبها.

أما نتائج هذا البحث فهي كل العنوف المنزلية ممنوعة في القوانين الإسلامية وفي القوانين الحكومية. فالفاعل لهذا الظلم يجب أن يُعاقب عقاباً شديداً. وفي إثبات القرار لقضية الطلاق



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بمحكمة الشؤون الدينية، ينبغي على القاضي أن يمر بالخطوات الطويلة والدقيقة والاعتبارات الكثيرة وفقا على القوانين، وتجميع القوانين الإسلامية، والأحكام الإسلامية تصدر قرار القضية إفادة للوقوع، والسبب، والشاهد، والدليل، والنتيجة النهائية للقضية. وبعد تحليل قرار القضية رقم 1430/ف.د.ت.ك/2020/ب.أ. ف.ب.ر في إثبات القرار، فيمكن الاستنباط بأن القاضي يعتمد على القوانين الحكومية والقوانين الإسلامية.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nur Zabiah (2021): "An Analysis of Decision on Case Number 1430/Pdt.G/2020/PA. Pbr about Domestic Violence Based on The Legislation No. 23 of 2004 and The Islamic Law in PA Class 1 A Pekanbaru City"

This research was motivated by the large number of divorce cases caused by Domestic Violence (*KDRT*) obtained through tracing the divorce case files, this is also due to the lack of knowledge of family members about their rights and obligations as well as the limits on whether or not violence is allowed in the family. As well as the lack of knowledge about the rules of both the legislation and or the Islamic law regarding this violence so that many perpetrators of violence are free to do so without being penalized, so that it does not cause a deterrent effect for the perpetrators. Based on the decision of the case Number: 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

The aim of this research was to find out The Domestic Violence (*KDRT*) in terms of the legislation and positive law, to find out the results of the decisions of the Religious Courts, to find out the correlation of the decisions of the Religious Courts Number of the Religious Courts' Decisions to divorce cases in the case file number 1430/Pdt.G/ 2020/PA.Pbr with the legislation and the Islamic law.

This type of research used in the preparation of this thesis is a library research. which is the research conducted with the aim of illustrating, describing the objects and phenomena studied. The data sources are in the form of documents or divorce case files Number 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr and other sources from various literatures such as books, legislations and other sources that are relevant to this research. The analysis technique was carried out by examining the data starting with examining all the data, studying and compiling it.

The results of this research are that all forms of domestic violence are prohibited both in Islam and the law. Therefore, there are strict sanctions for perpetrators of violence. In terms of deciding a divorce case in the Religious Courts, the judge goes through a long process and a lot of considerations of the Law, the Compilation of Islamic Law, and Islamic law that gave birth to the decision of the case, which explains all the events, causes, witnesses, evidence and the final outcome of a case.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan yang sudah menikah pasti menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keluarga penuh dengan cinta kasih, damai dan tentram untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan dalam masyarakat yang mengarah kepada kesejahteraan bangsa. Menurut Sayyid Sabiq, terbentuknya keluarga melalui tali perkawinan yang sah merupakan jalan yang dipilih Allah untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹ Akan tetapi, fakta dilapangan masih banyak keluarga yang jauh dari harmonis, banyak kasus perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun hal itu sangat dikecam baik dalam agama maupun perundang-undangan.

Keluarga yang dibentuk melalui ikatan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, dengan penuh kasih sayang antaranggota keluarga dan lingkungan sekitar yang serasi, dan bisa menghayati, memperdalam serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.² Keluarga tercipta melalui pernikahan yang sah, Menurut Fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Jakarta: PT. Al-Ma’arif, 1980), Jilid 6, hal. 7

² Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen kantor Wilayah Provinsi Jawa barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hal.2

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’a*, Jilid 4, (Beirut Libanon: Dar ihya al-Turas al-Arabi), hal. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun nikah adalah akad yang sudah ditetapkan oleh syariat yang fungsinya untuk menjadikan kehalalan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.⁴

Impian setiap pasangan yang ingin membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan yang kuat melalui akad atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan nikah disebutkan dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁵

Hubungan suami istri atau dalam kehidupan keluarga akan selalu ada masalah, baik besar maupun kecil. Akan tetapi, konflik yang terjadi dalam keluarga beragam jenisnya, bagaikan irama dan seni yang menghiasai kehidupan rumah tangga yang tidak mempengaruhi dan mengurangi keharmonisan keluarga, namun ada juga yang dominan mengarah kepada perselisihan yang sangat panjang dan mengancam eksistensi hubungan perkawinan.⁶ Penyebab terjadinya masalah dalam keluarga biasanya disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri dan tidak adanya upaya memelihara nilai-nilai keluarga yang dikehendaki dan disenangi oleh semua anggota keluarga.⁷

⁴ Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 39

⁵ TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), hal. 1

⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 107

⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2004), hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berjalan secara baik buat selama-lamanya, maka untuk mempertahankannya perlu usaha yang keras agar perkawinan tetap berjalan sampai ajal yang memisahkan keduanya. Adapun masalah yang muncul dalam keluarga tak sedikit yang berujung terhadap perceraian, adapun perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan antara suami dan istri yang diucapkan oleh suami secara sadar kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas atau sindiran. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸

Islam membenarkan adanya perceraian jika hal ini lebih membawa kepada kondisi yang lebih baik daripada tetap mempertahankan perkawinan akan tetapi membawa kepada kesengsaraan lahir maupun batin. Karena ketenangan dan kebahagiaan dalam perkawinan tidak akan dapat terwujud jika ada hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Sebab kebahagiaan adalah sesuatu yang muncul dari secara alamiah dan tidak ada paksaan, hal ini yang menyebabkan Islam mengikat kuat hubungan perkawinan, akan tetapi tidak mempersulit juga dalam hal perceraian.⁹

Terjadinya suatu perceraian tidak luput dari banyak faktor yang mempengaruhi hubungan perkawinan, berbagai alasan dijadikan oleh pasangan untuk melakukan perceraian, sebab dibolehkannya melakukan perceraian agar

⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 46

⁹Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terciptanya keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan, agar tercerminnya rasa keadilan serta nilai luhur berdasarkan ajaran agama Islam.¹⁰

Laki-laki sebagai suami atau ayah untuk istri dan anak-anak, harusnya mampu menjadi pelindung serta suri tauladan yang baik bagi siapa saja dalam keluarga tersebut, baik buruknya sebuah keluarga kembali kepada bagaimana seorang pemimpin keluarga membangun keluarganya. Akan tetapi, fakta yang terjadi dilapangan sangat jauh berbeda, banyak kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berkas perkara putusan hakim dalam persidangan yang merupakan produk akhir yang dikeluarkan setelah melalui proses panjang tahapan persidangan, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam sebuah persidangan, putusan ini diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara atau sengketa.¹¹ Yang isinya mencakup duduk perkara atau penjelasan keadaan serta kondisi keluarga yang berujung pada perceraian, kemudian pertimbangan hukum, yaitu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian dan menghasilkan putusan akhir dari perkara. Tujuan adanya berkas perkara sebagai bukti

¹⁰H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dokumentasi dan transparansi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan sebuah perkara dilingkungannya.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat 2.282 perkara yang masuk di Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Pekanbaru dan yang putus pada tahun itu sebanyak 1.925 perkara. Adapun perkara perceraian yang putus selama tahun 2020 adalah sebanyak 1.710 perkara, jika dilihat dari masing-masing faktor penyebab perceraian, 1400 perkara kasus yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan kekerasan ringan, meninggalkan salah satu pihak istri sebanyak 205 perkara, dihukum penjara sebanyak 13 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 4 kasus, cacat badan sebanyak 2 kasus, murtad sebanyak 4 kasus dan faktor ekonomi sebanyak 12 kasus.¹²

Islam telah mengatur batasan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga akan tetapi banyak yang tidak paham. Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk menjaga dan memelihara keluarganya, sekaligus menjadikan urusan itu sebagai tanggungjawabnya. Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, memelihara hak keluarga dan mengajarkan akhlak dan agama kepada setiap anggota keluarganya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum negara serta tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Islam mengajarkan untuk menebarkan peramaian serta kasih sayang sesama makhluk ciptaan Allah dan tidak melegalkan kekerasan

¹² Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau superioritas laki-laki atas perempuan serta mengajarkan persamaan hak antara suami dan istri dalam membina kehidupan berumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan tindakan keras terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹³

Mengambil dari kasus yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan penggugat Zulfa Amira Zaed dan tergugat Yudhi Pranata *“Tergugat beberap kali melakukan kekerasan rumah tangga dihadapan anak-anak, seorang yang tidak bekerja dan membiarkan istri menjadi tulang punggung keluarga, memiliki banyak hutang dan tidak menghormati keluarga penggugat.”*¹⁴ *Tergugat sering melakukan kekerasan seperti pemukulan sebanyak dua kali pada bulan agustus 2019 di depan anak pertama, tidak memberikan nafkah kurang lebih selama 1 tahun. Tergugat terlilit hutang dengan rentenir. Penggugat dan tergugat sering bertengkar sampai melontarkan kata-kata kasar dan sampai melakukan kekerasan fisik berupa mencekik penggugat saat terjadi pertengkaran.*

¹³Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 4.

¹⁴Putusan Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tergugat adalah orang yang keras kepala, egois dan selalu ingin menang sendiri, suka main pukul (KDRT) apabila terjadi perselisihan, tergugat memiliki gadis selingkuhan, pengonsumsi narkoba, tidak memberikan nafkah dan tidak melakukan sholat wajib lima waktu. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2020, selain itu tergugat juga sering melontarkan kata-kata kotor kepada istri dan anak-anaknya bahkan melakukan kekerasan serta menuduh penggugat sudah melakukan perbuatan zina dan mengancam akan memasukkan kedalam penjara. Memiliki sifat tempramen dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu berkata-kata kotor kepada penggugat seperti mengatakan penggugat anjing dan mencaruti penggugat dan berujung kepada melakukan pemukulan kepada penggugat. Tergugat pengguna obat-obatan terlarang, sering mengonsumsi minuman keras, main judi, berbicara kasar, sering melakukan KDRT. Tergugat merupakan seorang pengguna narkoba dan pernah dihukum penjara pada akhir tahun 2013, tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan saat ini tergugat sedang ditahan dipenjara karena kasus pencurian yang dilakukan pada bulan mei 2020.

Merujuk kepada banyaknya kasus perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dan adanya Undang-Undang dan aturan dalam Islam yang mengatur tentang larangan terjadinya kekerasan dalam keluarga maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1430/PDT.G/2020/PA/PBR. TENTANG KDRT BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A KOTA PEKANBARU”**

B. Penegasan Istilah

1. Putusan Perkara

Putusan perkara adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁵ Sedangkan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. putusan perkara adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.¹⁶

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, menyatakan bahwa kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷ Menurut Mansor Fikih, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010), hal. 131

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2002), hal. 158

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bentuk serangan atau invasi kepada fisik maupun integritas terhadap keadaan mental psikologi korbannya.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu tempat atau lembaga peradilan yang berada di Ibukota Kabupaten untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁸

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah antara lain penyebab-penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan perceraian pada kasus kekerasan fisik di Pengadilan Agama Pekanbaru, dasar keputusan Pengadilan Agama dalam memutuskan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan fisik, apakah dasar keputusan hakim sudah memenuhi unsur keadilan untuk semua pihak, Penerapan Undang-Undang terhadap kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan, putusan Pengadilan Agama tersebut jika ditinjau dari hukum Islam, kesesuaian proses pengadilan dengan Undang-Undang.

D. Batasan Masalah

¹⁸ Pasal 2 ayat 2 dan 3 Perma No.1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hân vîpîa mîmîm UIN SUSKA RIAU

Agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan efisien dalam mencapai pokok masalah, maka penulis memberikan batasan dalam membahas masalah, antara lain:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi pengertian, sebab terjadinya, jenis-jenis dan dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.
3. Peran perangkat hukum/ pengadilan dalam hal putusan perkara nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Kelas 1 A dalam memenuhi unsur keadilan para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan perceraian yang disebabkan kekerasan di Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jika ditinjau dari Undang-Undang dan hukum Islam?
3. Apakah putusan perkara nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr sudah sesuai dengan acuan Undang-undang dan hukum Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

late Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui hasil Putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan cerai gugat pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kolas 1 A Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui lebih dalam tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilihat dari sudut pandang Islam dan perundang-undangan negara.
- c. Mengetahui sejauh mana korelasi putusan Pengadilan Agama Nomor Putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan cerai gugat pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nomor perkara 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr ini dengan Undang-Undang dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Tulisan ini diharapkan bisa menambah ilmu dan wawasan khususnya pada diri penulis sendiri dalam dunia pendidikan dan wawasan keislaman serta mampu menjadi media dalam mengembangkan ilmu yang sudah didapat.
- b. penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi untuk perkembangan pemikiran pada bidang keagamaan khususnya dalam bidang hukum keluarga (*al-Akhwal as-Syakhsiyah*), dan secara praktis, Sebagai bahan pedoman, perbandingan dan acuan bagi semua lapisan masyarakat dalam membentuk keluarga *sakinah* dan jauh dari tindak kekerasan keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kajian Relevan

Kajian relevan merupakan deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah dilakukan mengenai masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan merupakan hasil pengembangan dari penelitian sebelumnya dan dapat dipastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan bukanlah pengulangan atau hasil duplikasi dari penelitian sebelumnya, ada beberapa sumber kepustakaan yang sebelumnya membahas penelitian ini antara lain:

Pertama, M. Khoiri Ridwan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (analisis ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan hadist tentang nushuz).Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang".¹⁹

Kajian dalam penelitian ini membahas tentang factor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah factor ekonomi, kesenjangan social dan pandangan terhadap argumentasi agama. Sementara kajian yang peneliti lakukan juga terpaku pada factor terjadinya perceraian antara lain karena factor ekonomi, pengetahuan agama tentang keluarga dan kesenjangan antara suami dan istri.

Kedua, Alif Utama Hs. "Hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya."²⁰ Penelitian perpustakaan yang membahas tentang hak-hak istri dari pernikahan siri yang mengalami

¹⁹M. Khoiri Ridwan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (analisis ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan hadist tentang nushuz). Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang", <http://etheses.uin-malang.ac.id/3176/1/13780011.pdf>. Diakses pada 1 Oktober 2020

²⁰<http://digilib.uinsby.ac.id/21296/2/Abstrak.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Ketiga, Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK Institut PTIQ".²¹ Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain adalah kekerasan fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga seperti ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan lainnya yang melawan hukum. Banyaknya kasus KDRT yang tidak diketahui oleh banyak orang lain sehingga menyebabkan minimnya bantuan terhadap korban KDRT, kurangnya pemahaman agama tentang membina rumah tangga menjadi salah satu factor pemicu terjadinya KDRT, oleh karena itu tulisan ini akan memaparkan KDRT dalam perspektif Islam. Adapun kesamaan penelitian ini dengan tulisan ini adalah membahas KDRT ditinjau dari perspektif agama Islam.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian relevan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori mencakup: Putusan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia mencakup putusan Hakim, dasar hukum putusan

²¹Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, Diakses pada tanggal 1 Oktober

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat dan rukun perceraian, hikmah perceraian, alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengertian kekerasan fisik mencakup definisi kekerasan fisik, jenis-jenis kekerasan, faktor pemicu terjadinya kekerasan, kekerasan fisik ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam..

BAB III Metode Penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang mencakup gambaran umum wilayah penelitian, tata tertip Pengadilan Agama, visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru, tinjauan tentang pos bantuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam, hasil Putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan cerai gugat pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kesesuaian putusan perkara dengan Undang-Undang dan Hukum Islam.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Agama keluar setelah dilakukannya pemeriksaan perkara lalu mengadilinya dan mengeluarkan produknya. Sejak awal berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, terdapat tiga macam produk Pengadilan Agama antara lain, putusan (*vonnis*), penetapan (*beschikking*) dan akta perdamaian (*acta van dading*).²⁹

Tentang putusan, merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara. Putusan sendiri adalah pernyataan hakim tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan.³⁰ Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam sebuah persidangan, putusan ini diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara atau sengketa.³¹

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim artinya putusan yang diucapkan oleh Hakim disebabkan kedudukannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui segala proses serta prosedur

²⁹ Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri*, (Raden Intan Lampung, 2017), hal. 157-160.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), hal.159.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum acara perdata yang dibuat berbentuk tulisan serta mempunyai tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.³²

Menurut Ahmad Mujahidin, Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan ketika adalah suatu pernyataan sedang berlangsungnya persidangan dan mengartikan bahwa selesai atau berakhirnya persidangan dan selesainya suatu perkara³³. Dari beberapa pengertian putusan diatas, maka penulis tarik kesimpulan yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang di ucapkan oleh hakim sebagai seseorang yang mempunyai wewenang penuh dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati proses dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam persidangan. Tujuannya adalah menyelesaikan dan mengakhiri perkara dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara.

2. Dasar Hukum Putusan Hakim

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pastinya tidak akan dapat diganggu gugat lagi karena putusan tersebut dianggap pasti dan mengikat. Pada prinsipnya putusan hakim bertujuan dalam menyelesaikan perselisihan antara orang yang berperkara sebagaimana yang kehendaknya. Pihak yang berperkara harus mau mengikuti serta patuh kepada putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pihak yang berperkara wajib patuh dan menghormati setiap

³² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 149.

³³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hal. 337.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan dan mereka dilarang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan putusan tersebut, putusan yang sudah diputuskan tentu saja mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sifat yang mengikat ini memiliki tujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.³⁴

b. Kekuatan Pembuktian

Tujuan dari ditulisnya putusan adalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipergunakan jika dilakukannya banding, kasasi maupun eksekusi. Putusan pertama tersebut merupakan fakta otentik yang bisa digunakan sebagai alat bukti, karena putusan hakim merupakan keputusan yang konkret dan apa yang sudah diputuskan oleh hakim adalah benar dan menjadi bukti yang sesungguhnya yang berlaku bagi semua pihak yang berperkara maupun pihak ketiga.³⁵

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang sah tentu saja sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti pastinya mempunyai hak untuk dilaksanakan. Pihak yang dinyatakan kalah wajib untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan tidak mau mengikuti apa yang

³⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.309.

³⁵*Ibid*, hal.310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah diputuskan maka ketua pengadilan wajib menyuruh pihak yang kalah secara paksa.³⁶

3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Terdapat berbagai bentuk putusan Pengadilan Agama yang bisa dijatuhkan oleh hakim antara lain:

- a. Putusan hakim ditinjau dari fungsinya.
 - 1) Putusan akhir (*end vonnis*) merupakan putusan yang diakhiri dalam persidangan dan putusan pertama adalah produk utama dari persidangan tersebut.³⁷
 - 2) Putusan sela (*tussen vonnis*) merupakan putusan yang sudah dijatuhkan ketika masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan maksud untuk memperjelas dan agar persidangan berjalan lancar dan tertib.³⁸ Putusan tersebut harus disampaikan ketika sedang masih berlangsung dan tidak terpisah tapi masih dalam berita acara persidangan tersebut.³⁹ Putusan sela (*tussen vonnis*) bisa diminta banding harus bersamaan dengan permintaan putusan akhir. Seperti putusan akhir yang tidak terikat kepada hakim, begitu pula dengan putusan sela (*tussen vonnis*) putusan jenis ini tidak

³⁶ *Ibid*, Catatan, hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi. Selanjutnya lihat, Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal.83.

³⁷ Mukri Arto, *Praktik Perkara pada Peradilan Agama*, Cetakan. IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 252.

³⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.118

³⁹ Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 ayat (1) Rbg)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terikat kepada hakim bahkan hakim yang putusan ini mempunyai wewenang untuk merubah putusan ini jika ditemukannya kesalahan.⁴⁰

Terdapat berbagai macam acara dari putusan sela ini, antara lain:

- a) Putusan Preparatoir, adalah putusan persiapan mengenai kelancaran jalannya pemeriksaan untuk menghasilkan putusan akhir, misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan akhir.⁴¹
- b) Putusan Pertamainterlocutoir, merupakan putusan yang mana isinya adalah memerintahkan untuk pembuktian, contohnya putusan saksi atau pemeriksaan setempat, Karena putusan ini mengenai masalah pembuktian, maka putusan ini merupakan putusan yang sangat berpengaruh terhadap putusan akhir nanti.
- c) Putusan Pertamancidentiel, putusan ini berhubungan dengan peristiwa yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa, misalnya putusan yang di dalamnya pihak ketiga dibolehkan untuk ikut serta dalam perkara tersebut.⁴²
- d) Putusan Provisional merupakan putusan yang dalamnya menjawab tuntutan, pihak yang berperkara meminta agar diadakannya tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu pihak sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Misalnya

⁴⁰ Makamah Agung, 25 Oktober 1969, No. 391 K/Sip/1969, J.I. Pen. I/70, hal. 49.

⁴¹ Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.129.

⁴² *Ibid.* hal.130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kasus perceraian, sebelum diputuskannya pokok perkara, istri meminta untuk dibebaskan agar tidak tinggal bersama suaminya disebabkan karena suami suka melakukan tindak kekerasan.

b. Putusan ditinjau dari kehadiran para pihak.

1) Putusan gugatan gugur

Apabila sudah ditentukan jadwal sidang akan tetapi pihak penggugat tidak hadir atau tidak menyuruh perwakilannya untuk hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil oleh pihak pengadilan. Dengan demikian pihak tergugat akan dibebaskan dari perkara yang dimaksud terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet.⁴³ pihak penggugat bisa mengajukan gugatan baru dengan materi pokok sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat sehingga pihak penggugat bisa mengajukan kembali sebagai perkara yang baru akan tetapi pihak penggugat akan dikenakan biaya perkara yang yang awalnya sudah dibayar namun gugatan tersebut sudah digugurkan.⁴⁴

2) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah pernyataan bahwa pihak tergugat tidak hadir dalam sidang hari pertama namun memberikan surat jawaban yang mengemukakan (eksepsi). Walaupun pihak tergugat

⁴³ Bentuk Putusan Pertamari diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau wakil yang sudah ditunjuk berhalangan hadir maka hakim wajib memutuskan tentang eksepsi setelah pihak penggugat mendengarkan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Putusan yang sudah diputuskan dengan verstek tidak bisa dijalankan sebelum 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya pemberitahuan.⁴⁵

3) Putusan Constitutief

Putusan Constitutief adalah putusan yang benar-benar memastikan keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum atau yang menimbulkan keadaan hukum yang baru.⁴⁶ Contohnya putusan tentang kasus perceraian adalah putusan yang menghilangkan keadaan hukum atau tidak adanya ikatan hukum antara suami istri yang mana dengan putusan pertama menghilangkan hubungan perkawinan dan juga timbul keadaan hukum yang baru kepada suami. Maka suami dan istri tersebut resmi menyandang status janda dan duda sejak keluarnya putusan hakim dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁷

4) Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang didalamnya memuat hukuman yang dijatuhkan kepada salah satu pihak yang berperkara. Memberikan hukuman maksudnya menjatuhkan

⁴⁵ Pasal 128 HIR/152 RBg dan 149 Rbg. Jika diperlukan, maka dapat diperintahkan supaya Putusan Pertamatu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh Ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.

⁴⁶ YahyaHarahap, *Op.Cit*, hal.877

⁴⁷ Ahmad Fathoni Ramli, *Op,Cit*, hal.150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban kepada pihak yang kalah dan memberikan prestasi kepada pihak yang menang perkara. Prestasi bisa berupa yang berwujud memberi atau melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sama sekali sesuai dengan isi putusan.⁴⁸

B. Perceraian Dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak diambil dari kata *itlaq*, artinya meninggalkan atau melepaskan.⁴⁹ Menurut bahasa arab, kata talak berasal dari bahasa arab *المطله* yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya.⁵⁰ Dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan talak menurut bahasa adalah "*hall al-Qayyidi*" yang artinya melepaskan.⁵¹ Sedangkan menurut istilah syara', talak ialah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁵²

Artinya: "Lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan antara suami dan istri"

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kita Shahih fiqh sunnah talak ialah:

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، أَوْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ (أَي: بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أَي: بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ) بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.⁵³

Artinya: "Melepaskan ikatan nikah dengan lafal talak dan sejenisnya. Atau melepaskan tali pernikahan saat itu juga (yaitu dengan talak ba'in) atau masa yang akan datang (sesudah iddah dengan talak raj'i) dengan ucapan yang sudah ditentukan".

⁴⁸ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 13.

⁴⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

⁵⁰ Ahmad Warson Al-Munawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 862.

⁵¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Al-Jaffan wa Al-Jabi & Dar Ibni Hazm, 2004), hal. 84

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet I (Bogor: Kencana, 2003), hal. 191.

⁵³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir: Dar at - Taufiqiyah litturots, t.th), jilid 3, hal.232



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdurrahman Al-jaziriy dalam kitab *Al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah* talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ⁵⁴

Artinya: "Talak adalah hilangnya ikatan tali pernikahan atau berkurangnya ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu".

Adapun talak menurut Zamari Hamid⁵⁵, adalah:

- a. Ucapan tertentu yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya ikatan perkawinan.
- b. Lepas atau berakhirnya ikatan hubungan suami istri.
- c. Melepas tali perkawinan dengan ucapan talak atau ucapan yang semisal dengan itu.

Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud perceraian atau talak adalah melepaskan atau bubarnya hubungan pernikahan.⁵⁶ Dalam kitab *Kifayatu Akhyar*, talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah *lafaz jahiliyyah*. Akan tetapi, setelah Islam datang maka ditetapkan lafaz itu menjadi lafaz dalam melepaskan ikatan pernikahan. Dan dalil-dalil tentang talak sudah diatur dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'.⁵⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di

⁵⁴ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar Fikr,) hal. 278

⁵⁵ Zamri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. (Bandung: Bina Cipta) hal. 73

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Jilid 8 (Bandung: al-Ma'arif, 1998), hal. 9

⁵⁷ Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni as-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), hal. 461

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pengertian talak menurut `bahasa dan istilah, hampir sebagian ulama mengemukakan hal yang sama tentang pengertian talak, penulis mengambil kesimpulan bahwa talak adalah hilangnya atau rusaknya ikatan perkawinan antara suami dengan istri dengan menggunakan lafaz tertentu dan semisalnya yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.

2. Dasar Hukum Perceraian.

Setiap produk hukum yang ada tentu saja harus berdasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan posisi kedudukan hukum tersebut, termasuk dalam hal talak, adapun landasan adanya talak antara lain:

a. Al- Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



⁵⁸Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 117, hal. 261



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Jenistalak yang bisa di rujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali akan tetapi dengan cara yang baik atau kamu mentalaknya dengan cara baik juga. Haram bagi kalian untuk mengambil lagi apa yang sudah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika kalian khawatir tidak dapat menjalankan aturan Allah. Jika kalian khawatir jika suami isteri tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka baginya tidaklah ada dosa tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, dan jangan kamu melanggarnya. Maka siapa yang melanggar hukum-hukum maka mereka termasuk orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqoroh: 229)⁵⁹

2) Surah At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai para Nabi, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka hendaklah kalian menceraikannya ketika mereka sudah benar siap untuk menghadapi masa iddahnya (yang wajar) dan hendaklah kalian menghitung masa iddahnya tersebut dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Dan Janganlah kamu biarkan mereka keluar dari rumah mereka dan jangan kamu izinkan mereka untuk keluar rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Dan itu merupakan hukum Allah dan zalimlah orang yang sudah melanggar hukum Allah. Dan Allah menyiapkan sesuatu yang baru tanpa sepengetahuan kalian. (Q.S At-talaq : 1)⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 37

⁶⁰*Ibid*, hal. 559



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Surah Al-Baqoroh ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Jika kamu menjatuhkan talak kepada istrimu kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah kalian menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi dengan orang yang bakal menjadi suaminya jika antara keduanya terdapat rasa sukarela dengan cara yang ma’ruf. Hal ini yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang beriman dan hari kemudian. Ini lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui (Q.S Al-Baqoroh: 232)⁶¹

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَه , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ⁶²

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan yang halal akan tetapi paling Allah benci adalah talak"(Riwayat Abu Dawud danI bnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

c. Ijma’ dan Akal

Ibnu Qudamah mengatakan, “Manusia bersepakat tentang bolehnya talak, dan ‘ibrah (pertimbangan akal) menunjukan

⁶¹Depertemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 38

⁶²Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud* Jilid II, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, t.th), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan.” Karena terkadang hubungan di antara suami istri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.⁶³

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38, menyebutkan :*“Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Keputusan pengadilan”*

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain undang-undang, perceraian juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti yang tertuang dalam pasal 113: *“Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas putusan pengadilan. Dan pasal 114 disebutkan juga “Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*

⁶³ Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Ilmiah , t.th), jilid.3. hal. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dan Rukun Talak

Dalam menjalankan suatu ibadah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal atau tidak sah, berikut syarat dan rukun talak:

a. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut,⁶⁴ adapun rukun talak itu sebagai berikut:

- 1) Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- 2) Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak⁶⁵
- 3) Sighat talak, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain.⁶⁶ Artinya bahwa dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Adapun yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud mengucapkan talak, karena seorang yang sudah

⁶⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 201

⁶⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.ke-1, hal. 467.

⁶⁶ Ibnu Abidin, *Raad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), jilid 4, hal. 438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakal/baligh akan mengatakan talak karena benar-benar sudah meniatkannya.⁶⁷

b. Syarat Talak

Disyaratkan bagi orang yang mentalak hal-hal berikut ini:

- 1) *Baligh*, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Menurut ulama mazhab Hambali, anak kecil yang menjatuhkan talak dianggap sah meskipun umurnya belum mencapai usia dewasa.⁶⁸
- 2) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud gila disini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena demam atau sakit ingata yang disebabkan rusaknya syaraf otaknya.⁶⁹
- 3) Atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak bukan karena paksaan. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi mengatakan talak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang terpaksa.⁷⁰

⁶⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.* hal. 204.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet. ke-11 (Jakarta: lentera, 2004), hal. 441.

⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 202.

⁷⁰ *Op, Cit*, hal.442.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu Zahrah, dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*, mengatakan bahwasan dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.⁷¹

4. Macam-macam Talak

Selanjutnya akan kami jelaskan satu per satu dari macam-macam talak, di antaranya.⁷²

- a. Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak oleh suami, antara lain:
 - 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami sesuai ketentuan Agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu.⁷³
 - 2) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah.⁷⁴
- b. Ditinjau dari kebolehan suami kembali kepada mantan istri, talak terbagi dua:
 - 1) Talak raj'i, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak ini terjadi pada talak satu atau talak ke dua.⁷⁵

⁷¹ *Ibid.*, hal. 442

⁷² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 130.

⁷³ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 237.

⁷⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Talak bain, adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya, untuk mengembalikan ikatan pernikahan antara suami dan istri, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁷⁶
- c. Ditinjau dari ketegasan atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatukan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam:
 - 1) Talak sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.
 - 2) Talak kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata “saya sekarang sendirian dan hidup membujang”.

5. Hikmah Talak

Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *sakinah, mawaddah, warahmah* dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling melengkapi. Di samping itu harus juga mewujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid*, hal. 196.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 198.

⁷⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Terj. Abdul ghafar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak merasakan cinta kasih, lalu antara keduanya sudah tidak saling perhatian dan tidak lagi saling menjalankan tugas dan kewajiban sehingga yang ada hanya perselisihan dan tipudaya. Lalu keduanya memiliki titik baik untuk saling memperbaiki akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pihak masing-masing keluarga juga sudah melakukan usaha perdamaian namun tidak membuahkan hasil juga, maka pada saat itu talak merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh.

Andai saja Islam tidak memberikan jalan melalui talak bagi pasangan suami istri dan tidak membolehkan perceraian meskipun dalam kondisi yang sangat krisis dan darurat, tentu saja hal ini akan berdampak negatif terhadap pasangan suami istri. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban. Dari mereka akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami. Maka sejak saat itu talak menjadi jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Talak merupakan pilihan bagi setiap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan dengan tujuan untuk mengintropeksi diri dan memperbaiki kekurangan masing-masing.⁷⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan memiliki cakupan yang luas, yaitu *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental is intentionally inflicted on a person* atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain baik fisik maupun mental.⁷⁹ Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan luka baik fisik maupun psikologis. Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, menyatakan bahwa kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan hokum dalam lingkup rumah tangga termasuk acaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Para tokoh juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut Herkutanto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan

⁷⁸ *Ibid*, hal.206.

⁷⁹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Keprubadian dan Perjuangannya*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2008), hal, 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik fisik maupun psikis. Menurut Mansor Fikih, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk serangan atau invasi kepada fisik maupun integritas terhadap keadaan mental psikologi korbannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri banyak di temukan saat ini, ada yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini merujuk kepada banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aib keluarga yang orang lain tidak boleh ikut campur.⁸⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Islam adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik psikis maupun fisik.⁸¹

Menurut Imam Syafi'I, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan atau perkataan terhadap seseorang terutama istri yang menyebabkan penderitaan secara fisik maupun batin yang telah melewati batasan yang sesuai syariat Islam, dan ini sependapat juga dengan imam Hambali. Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebuah bentuk pemukulan, dan orang yang memukul bertanggung jawab selama pemukulan tersebut pantas dianggap sebagai pendidikan dan berada dalam batas yang diperbolehkan, maka jika ada pemukulan yang

⁸⁰ Hendra Alkhidmat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal, 31

⁸¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 245



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihi batas pendidikan, pelaku harus bertanggung jawab perbuatannya secara pidana.⁸² Menurut Imam Hanafi, kekerasan adalah kejahatan yang menyakiti fisik maupun non fisik, dan bagi korban kekerasan wajib hukumnya membela diri dan melawan upaya kejahatan pelaku meskipun harus ditempuh dengan cara membunuh penjahat tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relas laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud tidak hanya sebatas perceksoakan yang terjadi antara suami dan istri, karna jika hanya sekedar percekcoakan hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi, namun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih buruk. Hal ini berangkat dari cara pandang yang merendahkan martabat manusia dan relasi yang timpang serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja dalam kehidupan rumah tangga, baik pada suami, istri atau anak-anak atau pekerja dalam rumah tangga tersebut. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa mayoritas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi kepada kaum perempuan.⁸³

⁸² Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi' aljinai bi al-Islam Muqoronan bi al-Qanun al-Wadhi'*, (Beirut: Dar el Kitab el arabi, t.th), hal. 447

⁸³ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa macam bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya diatur dalam perundang-undangan Negara, akan tetapi Islam juga banyak menyinggung tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun jenis-jenis KDRT berdasarkan UU RI tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 tahun 2004 antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Dalam UU KDRT nomor 23 tahun 2004 pasal 5 huruf a, Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁸⁴ luka atau cacat pada tubuh seseorang bahkan yang berujung terhadap hilangnya nyawa seseorang.⁸⁵ Tindakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh sipelaku atau dengan alat bantu, perilaku yang termasuk dalam kekerasan fisik ini antara lain adala menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menedang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata dan sebagainya, biasanya perlakuan ini akan tampak seperti bilur-bilur, lebam, gigi patah, bekas luka dan lain sebagainya.⁸⁶ Dalam Islam banyak dijelaskan tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang menyangkut kekerasan fisik antara lain:

1) Pemukulan terhadap istri atau *nusyuz*

⁸⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal. 4

⁸⁵Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal. 14

⁸⁶Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro, Wanita dan Perkembangan Reproduksi ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Eksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks
- 3) Melakukan pelecehan seksual dan Zina
- b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan Psikologis adalah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada istri.⁸⁷ Tindakan ini bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban, hal ini dapat berdampak terhadap kejiwaan korban, korban mengalami gangguan psikis baik ringan maupun gangguan berat, kekerasan psikologis dapat berakibat korban menjadi takut mengungkapkan pendapat⁸⁸ menutup diri, susah mengontrol emosi, tertekan, penakut bahkan dapat mengakibatkan korban stress dan sebagainya. Kekerasan dapat terjadi pada mental seseorang apabila pasangan berbicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati pasangannya.⁸⁹

- c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan seperti pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, pemaksaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, atau yang biasa disebut dengan *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami sebagai kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan

⁸⁷ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal. 15

⁸⁸ *Ibid*, hal. 19

⁸⁹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015),

aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.⁹⁰ Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain:

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri karena faktor ketidaksiapan baik fisik maupun psikis.
- 2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
- 3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan atau berat.⁹¹

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Dalam artian suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal KDRT terjadi sebagai akibat lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung

⁹⁰Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2007), hal. 11

⁹¹*Ibid*, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak deterministik dan eksplitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadinya KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orangtua atau kepala keluarga yang sering ditampilkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatic baik kepada pasangan maupun anak.⁹²

Adapun dampak kekerasan terhadap korbannya antara lain⁹³:

a. Ditinjau secara psikologis, korban yang mengalami kekerasan akan berdampak rasa terisolasi, perasaan bersalah terus menerus dan tidak memiliki harga diri, rasa ketidakberdayaan terhadap apa yang terjadi dan pasrah terhadap keadaan. Kemungkinan terburuk kepada korban keekkrasan adalah stress berlebihan yang berujung kepada rusaknya kejiwaan.

Ditinjau secara medis, kemungkinan terburuk yang diterima korban kekerasan adalah kematian, baik karena kekerasan yang berujung pembunuhan atau bunuh diri, trauma fisik berat seperti memar, patah tulang, cacat. Kehamilan yang tidak diinginkan karena pemerkosaan dan dapat menimbulkan terjadinya aborsi, terjadinya gangguan haid, infeksi saluran air kencing dan gangguan pencernaan lainnya.

⁹²Marjan Miharja, *Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Pasuruan, Qiara Media, 2019), hal. 114

⁹³Dra. Norkasiani dkk, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), hal. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari aspek psikis korban, korban kekerasan biasanya mengalami stress, ketakutan yang berlebihan, depresi, putus asa, insomnia, disfungsi seksual, mengisolasi diri, menarik diri dari lingkungan dan mengalami berbagai macam kesengsaraan yang berkepanjangan, terkadang juga berpengaruh kepada psikis anak yang ibunya menjadi korban kekerasan.⁹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 disebutkan korban kekerasan berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya yang bersifat sementara atau penetapan perintah pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban kekerasan.
- c. Pelayanan khusus yang berkaitan dengan hal rahasia korban
- d. Pendampingan dari lembaga sosial dan bantuan hukum di setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- e. Layanan bimbingan rohani.

Tujuan utama dibentuknya undang-undang ini karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari semua bentuk kekerasan yang ada yang sesuai dengan makna pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, segala hal yang berbau kekerasan berarti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dianggap

⁹⁴ Saptosi Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia*, (Sleman: Deepublish, 2020), hal. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar Undang-Undang, hal ini juga merupakan sebuah bentuk diskriminasi dan kejahatan kepada martabat manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), cara penyelesaiannya terdiri dari empat bagian antara lain kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemulihan korban dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerapan sanksi hukum. Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami istri saat akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan hak meminta cerai istri atas suami (khulu').

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa perlindungan sementara, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor polisi, Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan, Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses Peradilan, Pendampingan advokat kepada korban di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan.

Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nomor 23 tahun 2004 disahkan dilatarbelakangi banyaknya kasus kekerasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dan juga kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia.⁹⁵

Munculnya Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi alasan untuk semua kalangan bahwasannya hukum melakukan kekerasan sangat dilarang, karena hal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia dan bentuk tidak menghargai manusia lainnya.

D. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan adalah suatu lembaga atau instansi untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman dan mempunyai wewenang absolut dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukan atau membentuknya. Pengadilan dalam bahasa arab disebut juga dengan Mahkamah.⁹⁶ Adapun pengertian pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut,⁹⁷ untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang berAgama islam,⁹⁸ pengadilan Agama sering juga disebut dengan *Mahkamah syariah*.

⁹⁵ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Penting dalam KUHP)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 117

⁹⁶ M. Tahir Azhary, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI, 1982), hal. 18

⁹⁷ Sulaikin Lubis et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 3

⁹⁸ Pasal 2 ayat 2 dan 3 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 03

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Pengadilan Agama

Perkembangan Pengadilan Agama, berangkat dari munculnya Peradilan Agama yang melalui dimensi waktu yang sangat panjang, ia muncul bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, setiap dimensi mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mempunyai inovasi-inovasi baru dalam Peradilan tersebut terutama pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan.⁹⁹

a. Peradilan Agama pada Masa Kolonial Belanda

Sejak tahun 1800 M, para tokoh besar Belanda telah mengakui bahwa masyarakat Islam Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislamannya, hal ini dibuktikan dengan jika ditemuinya masalah dalam masyarakat, maka penyelesaian yang senantiasa ditempuh kembali merujuk kepada Agama, baik masalah ibadah, politik, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis pada 78 *reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie* yang disingkat dengan *regreerings reglement* (RR) *staatsblad* tahun 1854 no. 129 dan *staatsblad* tahun 1855 No. 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang Agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia.

Adapun bunyi pasal ini adalah “apabila terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau yang dipersamakan, maka mereka

⁹⁹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib tunduk terhadap putusan hakim Agama atau masyarakat yang berdasarkan UU Agama atau ketentuan lama.¹⁰⁰

Awalnya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan Agama, pada tahun 1882 Belanda mengeluarkan penetapan baru yang dimuat dalam *staatblad* 1882 no. 152. Ketetapan tersebut memiliki perubahan yang sangat penting antara lain:

- 1) Reorganisasi ini pada dasarnya membentuk Pengadilan Agama yang baru disamping *Landraad* dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten.
- 2) Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaan. Menurut Noto Susanto, perkara-perkara itu umumnya meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan Agama Islam.

Sejak saat itu pemerintah Belanda resmi membentuk Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Madura. Peradilan Agama ini memiliki wilayah kewenangan dan kekuasaan meliputi:¹⁰¹

- 1) Perselisihan antara suami istri yang bergama Islam
- 2) Perkara-perkara tentang: nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang berAgama Islam
- 3) Menyelenggarakan perceraian

¹⁰⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 8

¹⁰¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 10-11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (*ta'liq al-thalaq*) telah ada.
- 5) Perkara mahar atau maskawin
- 6) Perkara kewajiban suami untuk memberikannya nafkah kepada istri.

Pada tahun 1882 sampai 1937 secara yuridis formal, Peradilan Agama menjadi suatu badan Peradilan yang berhubungan dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 11 Agustus 1882 M. Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 M yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 no.153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882 M.¹⁰²

b. Peradilan Agama pada Masa Kemerdekaan

Pada masa ini perundang-undangan yang berlaku masih berdasarkan pada peraturan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948 M, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Peradilan Agama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang ini, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh tiga lembaga Peradilan antara lain.¹⁰³

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Tata Usaha

¹⁰² Abdul Halim, *Op. Cit.*, hal. 51

¹⁰³ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hal. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peradilan ketentaraan.

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan pasal 98 UUD sementara dan pasal 1 ayat (4) UU Darurat no. 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Menurut ketentuan pasal 1, "di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukum sama dengan daerah hukum pengadilan negeri". Adapun yang tertuang dalam ketentuan pasal 11, "jika tidak ada ketentuan lain, maka pada Ibukota propinsi akan diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang wilayah kerjanya meliputi satu daerah atau lebih yang ditetapkan oleh menteri Agama."¹⁰⁴

Menurut ketentuan pasal 4 PP, kekuasaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa atau memutuskan perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, ruju', fasakh, nafaqah, maskawin (mahr), tempat kediaman (maskawin), muth'ah dan lain sebagainya.

¹⁰⁴ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hal. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum Agama Islam.¹⁰⁵

Setelah kurang lebih 25 tahun kemerdekaan Indonesia, muncul berbagai macam penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan. Sejak saat itu Peradilan Agama bukan lagi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri karena putusan Pengadilan Agama harus mendapat pengukuhan dari Peradilan umum dan Peradilan Agama tidak dapat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau eksekusi sendiri karena tidak ada perangkat juru sita, eksekusi menjadi kewenangan Peradilan umum.

Hingga tahun 1977, belum ada hukum yang resmi mengatur tentang Peradilan Agama secara khusus sebagaimana dihendaki UU No. 14 tahun 1970, maka setiap ada Mahkamah Peradilan Agama yang sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung sudah diatur peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1977 dan surat edaran Mahkamah Agung nomor MA/Pemb/0921/1977.

Munculnya peraturan ini tentu saja menghapus Mahkamah Islam Tinggi serta kerapatan para Qadi besar dan Pengadilan/Mahkamah Syari'ah propinsi memiliki fungsi sebagai pengadilan tingkat banding dan sekaligus pengadilan tertinggi dalam lingkungan Peradilan Agama.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Cik Hasan Bisri, MS., *Op. Cit.*, hal. 115

¹⁰⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 17-18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1989 posisi Peradilan Agama semakin kuat, dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang unikatif. Selain itu, dengan perumusan KHI yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, maka salah satu masalah yang dihadapi oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu keanekaragaman rujukan serta ketentuan hukum yang dapat diatasi. Berkenaan dengan hal itu, maka dalam uraian berikutnya dikemukakan tentang UU no.7 tahun 1989 serta instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁷

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem Peradilan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan Agama.

3. Wewenang Pengadilan Agama

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkup Peradilan Agama.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Cik Hasan Bisri, MS., *Op. Cit.*, hal. 117-118

¹⁰⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hal. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kewenangan relative perkara gugatan

Kewenangan ini meliputi gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat, apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka gugatan diajukan ke pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak, dan jika dalam akta ditentukan domisili pilihan, maka gugatan sesuai dengan pengadilan yang dipilihnya.¹⁰⁹

2) Kewenangan relative perkara permohonan

Kewenangan ini ditentukan dalam perkara tertentu dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut:¹¹⁰ Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Permohonan Dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan, permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dimana pernikahan dilaksanakan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dimana pernikahan berlangsung atau tempat suami dan istri tinggal saat itu.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 34

¹¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengecualian kewenangan relative terhadap perkara gugatan

Kewenangan relative perkara gugatan pada Pengadilan Agama memiliki beberapa pengecualian yaitu permohonan cerai talak dan perkara cerai talak.¹¹¹

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam lingkup Agama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan Agama Islam.

E. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Melihat dari sejarah perkembangan Pengadilan Agama yang memiliki rangkaian sejarah yang panjang, berawal sejak zaman sebelum penjajahan Hindia Belanda sampai saat ini. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama di Pekanbaru tidak lepas dari perkembangan sejarah berdirinya Pengadilan Agama di Pekanbaru.

Peradilan Agama sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak Islam mulai masuk dan penduduk Indonesia mulai menganutnya, dan ini terhitung berabad-abad lamanya sebelum masuknya penjajah ke Indonesia.

¹¹¹Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi," Vol.7, No. 2 Desember 2016, hal. 286



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama karena sudah menjadi kebutuhan dan kesadaran hukum umat islam di Indonesia.¹¹²

Awal mula berdirinya, Pengadilan Agama di Indonesia merupakan sebuah insitusi yang sangat tua, bahkan lebih tua dari merdekanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pengadilan Agama sudah tumbuh dan berkembang sejak berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, menurut sejarah Peradilan agama bersamaan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, Banten, Cirebon dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Lembaga Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili dan memutuskan perkara untuk menghilangnya gugat menggugat dan menjadi penengah dalam konflik hukum yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadits.¹¹³

Awalnya lembaga Peradilan Agama lebih dikenal dengan istilah *Mahkamah Syariah* yaitu ketika kerajaan Islam baru masuk ke Indonesia, kemudian penjajahan belanda dimulai dan bangsa belanda banyak mendominasi kehidupan masyarakat pada berbagai bidang, termasuklah bidang hukum, dengan demikian nampaklah bahwa bangsa Belanda sangat berpengaruh dalam lembaga Peradilan Agama yang ada saat itu meskipun Indonesia hampir mencapai masa kemerdekaannya.

¹¹²Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2, hal. 42

¹¹³T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1982 sebelum lembaga Peradilan Agama di resmikan, pemerintahan colonial Belanda saat itu telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama yang ada dikalangan umat Islam di Indonesia, antara lain adalah:

- a. Pada bulan September 1908, keluarnya intruksi dari Hindia Belanda yang ditujukan kepada para bupati yang isinya, “urusan-urusan yang berkaitan dengan agama bagi orang Jawa tidak akan adanya ganggua-gangguan, jika ada kasus banding maka bisa mengajukannya ke Pengadilan Banding”
- b. Pada tahun 1820, lewat Statblad Nomor 22 pasal 13 ketentuan bahwa para bupati wajib memperhatikan urusan-urusan yang berkaitan dengan Agama Islam, agar para pemuka agama bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan adat dan kebiasaan orang Jawa, misalnya seperti masalah perkawinan, pembagian harta warisan dan lain sebagainya, adapun istilah bupati dalam ketentuannya bisa dikomkulusikan bahwa Peradilan Agama sudah ada di seluruh tanah Jawa.¹¹⁴
- c. Pada tanggal 3 Juni 1823, melalui Revolusi Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 secara resmi dibuka Pengadilan Agama di kota Palembang yang diketuai oleh seorang yang disebut dengan Pengeran/Penghulu, untuk masalah banding sendiri langsung kepada sultan.

Berdasarkan uraian diatas dipahami bahwa adanya lembaga Peradilan Agama untuk umat Islam walaupun masih dalam masa penjajahan Belanda,

¹¹⁴Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2, hal. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan tetapi lembaga Peradilan Agama sudah diakui oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tahun 1957, berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 tahun 1957 mengenai pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura telah dibentuk lembaga Peradilan Agama di wilayah Sumatera Bagian Tengah yang meliputi wilayah Riau, Sumatera Barat dan Jambi yang dicantumkan dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.¹¹⁵

Awal mula berdirinya Pengadilan Agama di wilayah Riau masih bagian dari wilayah hukum Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah wilayah Padang sampai keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pasal 1 tentang tugas Pengadilan Agama, isinya mengatur daerah yang di dalamnya terdapat Pengadilan Negeri, sejak saat itu masing-masing daerah wajib mendirikan Pengadilan Agama yang mempunyai wilayah hukum sama dengan Pengadilan Negeri. Selanjutnya para pemuka masyarakat yang terdiri dari para alim ulama dan kaum cerdik pandai mencari orang yang memenuhi syarat dan mampu dirasa mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di kota Pekanbaru.¹¹⁶

Berdasarkan hasil mufakat dari beberapa Alim Ulama dan para cendekiawan yang berada di daerah Pekanbaru, maka di usulkan pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru atau Mahkamah Syariah Pekanbaru adalah KH. Abdul Malik yang merupakan anggota Mahkamah Syariah dari Sumatera Tengah yang berkedudukan di wilayah Bukittinggi. Melalui usulan

¹¹⁵Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Duta Karya, 1989), hal. 1-2.

¹¹⁶Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut para pemuka masyarakat Riau melalui KH. Mansur selaku ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di Bukittinggi dan bapak KH. Djunaidi sebagai kepala jawatan Peradilan Agama Jakarta secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 1958.¹¹⁷

Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 telah mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Hal ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99. Pada penetapan ini ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan meliputi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bengkalis, Rengat, Tanjung Pinang dan Bangkinang.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama, Pengadilan Agama belum banyak menerima perkara masuk untuk disidangkan. Hal ini berdasarkan pada faktor jumlah masyarakat Pekanbaru yang beragama Islam terbilang banyak yang menyelesaikan perselisihan pernikahan, thalak, pembagian harta warisan dan lainnya ke Kantor Urusan Agama daerah masing-masing. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum mengenal betul tugas, kedudukan serta fungsi antara Pengadilan Agama. Selain itu, belum jelasnya tugas dan fungsi

¹¹⁷SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri membuat masih semerawutnya penyelesaian perkara

Tidak lama setelah itu keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas dan fungsi Pengadilan Agama, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkaranya yang diselesaikan juga berdasarkan hukum Islam seperti perkara nikah, mahar, talak, rujuk, wasiat, shodaqoh, wasiat baitul maal dan lainnya yang berhubungan dengan perceraian dan pengesahan tentang ta'lik yang sudah berlaku.¹¹⁸

Masalah pembagian harta warisan merupakan wewenang Pengadilan Negeri, hal ini merujuk kepada statblad 1882 Nomor 152 tentang Undang-Undang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Akibat perbedaan pendapat antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri tersebut maka sering keputusan Pengadilan Agama yang terhambat pelaksanaannya akibat dari adanya eksekusi terdahulu dari Pengadilan Negeri. Hambatan ini baru dapat diatasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa serta menyelesaikan perkara untuk tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian Pengadilan Agama memiliki wewenang

¹¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan serta melaksanakan putusannya sendiri tanpa adanya ikut campur Pengadilan Negeri.¹¹⁹

Saat itu Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru beralamat di jalan Rambutan Nomor 20 juga melantik Abbas Hasan sebagai Penitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Awal dibukanya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah kotamadya Pekanbaru hanya menempati sebuah ruangan kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat itu Pengadilan Agama meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Lalu pada tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah dengan menyewa satu rumah penduduk yang terletak di jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Pekanbaru Kota. Lalu pada tahun 1969, kantor Pengadilan Agama pindah ke kantor Dinas Pertanian di Pekanbaru Kota, dan pada tahun yang sama KH. Abdul Malik yang merupakan ketua pertama Pengadilan Agama meninggal dunia pada tanggal 1 Januari.¹²⁰

Setelah meninggalnya KH. Abdul Malik, maka kepemimpinan Pengadilan Agama di gantikan oleh Drs. Abas Hasan yang awalnya menjabat sebagai panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 1972 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke Kecamatan Sukajadi dengan menyewa rumah, dan pada tahun 1976 kantor Pengadilan Agama berpindah ke jalan Kartini di Kecamatan Pekanbaru Kota dengan status kantor sendiri.¹²¹

Pada tahun 1979, Drs. H. Abbas Hasan pindah tugas sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang dan digantikan oleh Drs. H. Amir Idris, dan

¹¹⁹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), hal. 10

¹²⁰ SY. Efendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Loc.Cit.* hal. 5

¹²¹ *Ibid.* hal. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat itu terjadi lagi perpindahan kantor ke Jalan Peladuk di Kecamatan Sukajadi sampai pada bulan April tahun 2007 dan melalui beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama antara lain:

Tabel. 4.1
Daftar nama ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru

No	Nama	Tahun
1.	Drs. Marjohan Syam	(1988-1994)
2.	Drs. Abdulrahman HAR, SH	(1994-1998)
3.	Drs. H. Lumban Hutabarat, SH, MH	(1998-2001)
4.	Drs. Zein Hasan	(2001-2002)
5.	Drs. H. Harun S, SH	(2002-2006)
6.	Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH	(2006-2010)
7.	Drs. H. Firdaus, HM, SH, MH	(2010-2012)
8.	Drs. Abu Thalib Zisma	(2013-2016)
9.	Drs. H. Syaifuddin, SH, M.Hum	(2017-2018)
10.	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, SH. MH	(2018-2019)
11.	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	(2020-Sekarang)

Dalam kurun waktu yang panjang, Pengadilan Agama mengalami beberapa kali perpindahan kantor, berikut dijelaskan tentang perpindahan kantor dari tahun ke tahun antara lain:

Tabel 4.2
Lokasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Pekanbaru

No	Nama	Tahun
1	Jalan Rambutan No. 20	(1958-1966)
2	Jalan Riau Lama	(1966-1971)
3	Jalan Samratulangi	(1971-1973)
4	Jalan Singa	(1973-1976)
5	Jalan Kartini	(1976-1985)
6	Jalan Pelanduk No. 21	(1985-2007)
7	Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01	(2007-2015)
8	Jalan Parit Indah	(2015-2017-sekarang)

Terjadinya beberapa kali perpindahan disebabkan karena belum adanya kantor Pengadilan Agama yang memadai dan permanen, Pengadilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Pekanbaru pernah menumpang antara lain Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru akhirnya memiliki kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 21 Pekanbaru, dan pada bulan Februari 2015 secara permanen di Jalan Parit Indah Pekanbaru dan masa ini Pengadilan Agama Pekanbaru berada dibawah kepemimpinan Drs. H. Masrum, MH.

Perkembangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang melalui perjalanan panjang menuju eksistensinya, diawali dengan berpindah-pindahanya kantor sampai menyewa rumah penduduk bahkan menumpang pada kantor lembaga lain kurang lebih selama 24 tahun sehingga membuat citra Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi naif, seiring dengan berkembangnya zaman rola perjalanan Pengadilan Agama semakin membaik, hal ini tentunya tidak terlepas dari uluran tangan gubernur Riau yang saat ini dipimpinn oleh bapak Arifin Ahmad yang mau membantu membayar sewa rumah yang saat itu dijadikan kantor di jalan Singa. Selain itu, bapak guberburlah yang berjasa menitipkan Pengadilan Agama berkantor di kompleks Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau, perhatian besar juga diberikan oleh bapak walikota yang saat itu menjabat adalah bapak H. Herman Abdullah, MM yang sejak tahun 2005 memasukkan lembaga Pengadilan Agama ke dalam protocol Muspida dan memberikan fasilitas seperti mobil kepada ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 30 Juni 2004, merujuk kepada Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2004 tentang Pangalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syari’ah Propinsi, dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”. Sejak saat itu semua lembaga peradilan menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI bersamaan dengan peradilan lain yang secara yuridis mempunyai derajat yang sama akan tetapi secara factual masih ada kesenjangan yang perlu perhatian serius untuk menjadi antara lembaga peradilan yang ada di Indonesia.¹²²

Tata Tertib Pengadilan Agama

Pengadilan Agama biasanya terletak di daerah pusat pemerintahan, dan dalam persidangan hendaknya hakim yang mengadili berada ditemoat yang dapat dilihat dari segala arah, adapun tata tertib pengadilan dan hakim antara lain adalah:

- a. Bertempat tinggal di kota yang menjadi pusat pemerintahan, hal ini beralasan agar lebih cepat bertindak dalam menegakkan keadilan.

¹²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam mengadili, sebaiknya hakim duduk di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh semua pihak seperti terdakwa, penggugat, dan pengunjung yang bertujuan untuk menghilangkan prasangka buruk.
- c. Sebaiknyahakim tidak memutuskan perkara di masjid. Karena di masjid ada batasan dan adab yang harus di patuhi seperti tidak boleh bersuara keras, tidak bisa dimasuki oleh semua golongan dan lain sebagainya.¹²³

Disamping hal yang disebutkan diatas, hakim juga wajib bersikap adil dan menyamakan semua pihak yang berperkara, dalam menjatuhkan hukum hakim wajib mengikuti dan melaksanakan aturan pengadilan, menyamakan perlakuan terhadap orang-orang dalam hal duduk, menyampaikan dengan kata-kata dan perhatian yang sama. Sama dalam hal tempat duduk artinya masing-masing diberi tempat duduk yang sama dan bebas yang dapat melihat hakim dan tidak ada rasa tertekan. Kata-kata yang di maksud adalah setiap orang diberikan kebebasan dalam berargumen dan menyampaikan pendapatnya, masing-masing berhak mendapatkan perhatian yang sama, maksudnya adalah memperhatikan alasan-alasannya dan hakim berpandangan kea rah yang sama, terpenting adalah hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang bersengketa dengan alasan apapun.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Pengadilan Agama pekanbaru memiliki visi “terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

Adapaun misi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah:

¹²³Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-3, hal. 377.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dan moto Pengadilan Agama Pekanbaru ialah prima dalam pelayanan konsisten dengan aturan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang susunan Pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-undang disebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Setiap Pengadilan Agama pasti menetapkan adanya Kepaniteraan dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seseorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda (panmud), yang terdiri dari panmud gugatan, panmud permohonan dan panmud hukum, beberapa orang panitera pengganti, jurusita serta beberapa orang jurusita pengganti. Adapaun secretariat dipimpin oleh oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris dan tiga kepala urusan (kaur) antara lain kaur keuangan, kaur kepegawaian dan kaur umum.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terhitung sampai 31 Desember 2020 berjumlah 48 orang. Antara lain:¹²⁴



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁴Statistik/Struktur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
UIN SUSKA RIAU

Ketua
Drs. Ahmad Sayuti, M.H.
Wakil Ketua
Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H

Hakim	
Dra. H. Elis, S.H., M.H	Drs. Ali Imran, S.H
Drs. Nurhaida, M.Ag	Drs. Ahmad Anshary, S.H, M.H
Drs. H. Nursyamsiah, M.H	Drs. Asfawi, M.H
Drs. H. Januar	Dra. Hj. Nurlen afriza, M.A
Drs. Miranda	Drs. Sasmirudin, MH, MH
Drs. H. MHD. Nasir S, S.H, M.H.I	Drs. Abdul Aziz, M. HI
Drs. Sahlan, S.H, M.H	Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H
Drs. Asyari, M.H	H. Gusnahari, S.H, M.H
Drs. Sayuti, M.H	Dra. Zulhana, M.H

Panitera
H. Nuraedah, S.Ag

Sekretaris
Zosmel Zuly, S.T, M.Sc, M.H

Panmud Permohonan
H. Umi Salmah, SH

Panmud Gugatan
Zahniar, SH

Panmud Hukum
Fakhriadi, SH.MH

Kasubag Umum/Keuangan
Sutikno Hady SH

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Fitria Hayati, S.H, M.H

Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan
Hj. Ernita, SH

Kelompok Panitera Pengganti	
Akhyar, SH	Erdanita, S.Ag
Nurhakim, SH	Liza Fajriati S.H, M.H
Drs. Zulkafli, S.H, M.H	Rosita, S.H, M.H
Hidayati, S.Ag	Ana Gustina, S.H
Hj. Yulia Afrianti, S.Ag, MH	Elpitria, S.H.I, M.H
Zuriati, S.Ag	Fatimah Ali.SH.

Kelompok Fungsional	
Jurusita	Jurusita Pengganti
Syukri	Hidayah
Agus salim	Komaria
Khairul Anuar, SH	Rini Artati
Wawan Suwandi, SH	Almisri
Sugeng S.Kom	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan pasal 49 ayat No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan memiliki wewenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Wasiat
- c. Warisan
- d. Zakat
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pekanbaru melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas Pengadilan Agama di atas. Artinya Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya berdasarkan dengan Undang-Undang yang sudah diatur sebelumnya.

2. Wewenang Pengadilan Agama

a. Kekuasaan Relatif

Adapun yang di maksud dengan kekuasaan relative adalah kekuasaan yang dimiliki Pengadilan Agama yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat Banding.¹²⁵ Artinya, kekuasaan relative memiliki batasan atau cakupan. Batasan atau cakupan kekuasaan relative adalah kekuasaan yang meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kekuasaan relatif dirasa sangat penting untuk mengetahui kepengadilan mana seseorang harus mengajukan perkaranya.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru, Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut merupakan kekuasaan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹²⁶

- a. Perkawinan
- b. Wasiat
- c. Warisan
- d. Zakat
- e. Hibah
- f. Wakaf

¹²⁵Cik Hasan Bisri, MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), hal. 204

¹²⁶Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-1, hal. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Adapun mengenai jumlah dan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.¹²⁷

TABEL 4.3
Pengadilan Agama Pekanbaru
Rekap Jenis Perkara Diputus
Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Izin poligami	8 Perkara
2.	Pencegahan perkawinan	0 Perkara
3.	Penolakan perkawinan oleh PPN	0 Perkara
4.	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
5.	Kelalaian kewajiban suami	0 Perkara
6.	Cerai Talak	450 Perkara
7.	Cerai Gugat	1260 Perkara
8.	Harta bersama	20 Perkara
9.	Hadhonah	15 Perkara
10.	Nafkah anak oleh ibu	1 Perkara
11.	Hak-hak bekas istri	0 Perkara
12.	Pengesahan anak	0 Perkara
13.	Pencabutan kekuasaan orang tua	0 Perkara
14.	Perwalian pencabutan kekuasaan wali	11 Perkara
15.	Orang lain sebagai wali	0 Perkara
16.	Ganti rugi terhadap wali	0 Perkara
17.	Asal usul anak	0 Perkara
18.	Penolakan kawin campuran	0 Perkara
19.	Isbat nikah	20 Perkara
20.	Izin kawin	0 Perkara
21.	Dispensasi kawin	49 Perkara
22.	Wali adhal	8 Perkara
23.	Ekonomi Syariah	2 Perkara
24.	Kewarisan	11 Perkara
25.	Wasiat	1 Perkara
26.	Wakaf	2 Perkara
27.	Hibah	3 Perkara
28.	Penetapan ahli waris	66 Perkara
29.	Wali pengampu	2 Perkara

¹²⁷ Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Jenis Perkara	Total
30.	Gugatan eko sederhana	2 Perkara
31.	Pengangkatan anak	0 Perkara
32.	Daden verzet	1 Perkara
33.	Adopsi	2 Perkara
34.	Penetapan ahli waris kontensius	4 Perkara
35.	Penetapan Mafqud	0 Perkara
36.	Pengesahan Hibah	0 Perkara
Jumlah Total		1925Perkara

Tinjauan Tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru untuk pihak pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon. Dalam hal ini, bantuan hokum yang dimaksud adalah pemberian advis atau konsultasi hokum seputar hal yang di perkarakan. Bantuan dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun pihak yang menerima bantuan hokum adalah para pencari keadilan baik perorangan maupun kelompok yang jika ditinjau dari segi ekonomi tidak sanggup untuk membayar jasa advokat sebagaimana yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta PERMARI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Posbakum ada untuk pelayanan publik karena masih banyak masyarakat yang menurut hokum tidak tersalurkan kehendaknya dan tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang atau biaya (miskin) dan hal ini merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

a. Latar Belakang Berdirinya Posbakum

Posbakum merupakan ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru bagi masyarakat yang selama ini merasa kesulitan dalam memperjuangkan haknya di Pengadilan Agama. Didirikannya posbakum memiliki latar belakang antara lain:

- 1) Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan Prosedural.
- 2) Banyaknya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.¹²⁸

b. Dasar Hukum Posbakum

Berdasarkan latar belakang didirikannya Posbakum di atas, dapat dipahami bahwa pendirian Posbakum adalah suatu langkah yang sangat baik. Tetapi, hal itu juga harus dilengkapi dengan dasar hukum supaya setiap aktivitas Posbakum diakui oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum Posbakum adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta PERMARI (Peraturan Mahkamah Agung Republik

¹²⁸Yusar, (selaku Wakil Ketua), Wawancara, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 18 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara untuk para pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk membayar.

c. Tujuan Didirikannya Posbakum

Didirikannya Posbakum memiliki tujuan untuk memberikan bantuan hokum bagi masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru akan tetapi tidak mampu untuk membayarnya, hal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hokum yang ada di lingkungan Pengadilan Agama, yang merupakan tanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi agar tercapainya rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Disamping itu Posbakum memiliki tujuan untuk:

- 1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang sedang menjalankan proses hokum di Pengadilan akan tetapi secara ekonomis tidak mampu untuk membayar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
- 3) Meningkatkan akses terhadap keadilan.
- 4) Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.¹²⁹
- 5) Petugas pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru:
- 6) Muhammad Nefos, SH, selaku Pimpinan.
- 7) Kurniawan Syarif, S.Hi, selaku Tenaga Pembuat Gugatan.¹³⁰

d. Perkara-Perkara yang Dibantu Posbakum

Dalam memberikan pelayanan hokum di Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan tugas pokok dari Posbakum, dalam hal ini Posbakum membantu menyelesaikan semua jenis perkara Posbakum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama pekanbaru dalam rangka membantu penyelesaian perkara. Semua perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama bisa mendapatkan pelayanan bantuan hukum Posbakum sebanyak 18perkara dan 8 perkara merupakan perkara tentang perkawinan.

Dari 18 jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang sudah ditangani oleh Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2020 adalah:

- 1) Izin Poligami 8 perkara;

¹²⁹ Pasal 2 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

¹³⁰ Struktur Posbakum Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pembatalan perkawinan 1 perkara;
- 3) Gugatan (Cerai Talak 450 perkara, Cerai Gugat 1260 perkara);
- 4) Harta Bersama 20 perkara;
- 5) Penguasaan anak 15 perkara;
- 6) Nafkah anak oleh ibu yang kurang mampu 1 perkara;
- 7) Perwalian 11 perkara;
- 8) Itsbat Nikah 12 perkara;
- 9) Dispensasi Nikah 49 perkara;
- 10) Wali adhol 8 perkara;
- 11) Kewarisan 11 perkara;
- 12) Daden verzet 1 perkara;
- 13) Ekonomi syariah 2 perkara
- 14) P3HP/penetapan ahli waris 66 perkara
- 15) Wali pengampu 2 perkara
- 16) Adopsi 2 perkara
- 17) Penetapan ahli waris kontensius 4 perkara.
- 18) Gugatan eko sederhana 2 perkara

Merujuk pada data di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 2.282, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 1.986 kasus. Namun yang putus pada tahun itu adalah sebanyak 1.710 kasus dengan jumlah cerai talak 450 dan cerai gugat 1260 perkara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerai gugat, hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun sebelumnya.¹³¹

B. Alasan-alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Hasil dari penelusuran peneliti terhadap alasan-alasan terjadinya perceraian perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut :

1. Nafkah

Alasan terkuat saat ini perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah nafkah. Alasan yang dominan dari istri yang mengajukan perceraian adalah perkara nafkah, secara umum mengatakan suami tidak memberikan nafkah walaupun suami mempunyai penghasilan dan ada juga yang tidak mempunyai penghasilan tetap.¹³²

Dalam perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan anak-anaknya, Nafkah suami terhadap istri dan anak dalam rumah tangga sebenarnya telah melalui pembahasan panjang fiqh Islam. Dalam hal ini, fiqh menentukan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga. Akibat dibebankannya secara penuh tanggung jawab nafkah keluarga kepada suami, maka Islam menjadikan kepemimpinan rumah tangga berada di tangan suami.¹³³ Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. an-Nisa' 34 berikut :

¹³¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara yang diterima dan perkara diputus pada Tahun 2020.

¹³² Data olahan 2020, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*

¹³³ Fitriayah Wardie Murdani, *Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam*, dalam *Al-Insan*, NO. 3, Vol. 2, Tahun 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insa, 2006), hal. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”¹³⁴

Dalam ayat di atas Allah SWT. Menguraikan bahwa dia menciptakan laki-laki dengan memiliki beberapa derajat kelebihan dibandingkan perempuan, berupa fitrah fisik dan kewajiban yang menjadikan dia siap untuk memimpin keluarga. Sebagai kompensasinya, Allah SWT. Mewajibkan kepada para suami untuk memenuhi segala nafkah keluarga dengan penuh tanggung jawab.¹³⁵

Lebih dari itu, kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapangan ataupun sempit, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Untuk mendapatkan nafkah ini suami, Ulama sepakat menyatakan ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh istri:

- a. Ikatan perkawinan yang sah
- b. Istri taat dan patuh kepada perintah suami dalam hal kebaikan.
- c. Istri memenuhi keinginan seksual kepada suami, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.

¹³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 85

¹³⁵Fitriyah Wardie Murdani, *Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam*, dalam *Al-Insan*, NO. 3, Vol. 2, Tahun 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insa, 2006), hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Istri tidak menolak permintaan suami ketika diajak berpergian, kecuali jika istri yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya.
- e. Antara suami-istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.¹³⁶

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi oleh suami yang menjadikan istri berhak menerima nafkahnya. Jika istri tidak memenuhi syarat diatas, maka istri tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. Artinya istri yang berkerja tetap mendapatkan nafkah dari suami selama mereka dalam ikatan nikah yang sah dan menjalankan kewajiban melayani dan mematuhi suami.¹³⁷

Ulama Fiqh berpendapat bahwa suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang istri bekerja mencari nafkah, apabila suami tidak bisa bekerja mencari nafkah baik karena sakit, miskin atau kerena yang lain. Lebih tegas ulama Mazhab Hambali menjelaskan, seorang laki-laki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai perkerja yang setelah perkawinan juha akan terus bekerja atas alasan apapun. Fiqh membenarkan suami dan istri yang keduanya bekerja di luar rumah dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang berarti fiqh tidak memandang bahwa kewajiban seorang laki-laki untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi istri untuk bekerja di luar rumah juga untuk mencari nafkah.¹³⁸

¹³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif: 1980), hal.110-111.

¹³⁷ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz VII, hal. 573.

¹³⁸ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, hal.795

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan alasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Kekerasan dalam rumah tangga yang di maksud adalah kekerasan fisik dan psikhis dalam rumah tangga, baik yang berbentuk fisik merusak jasmana baik yang berbentu kata-kata kasar, bentakan, penghinaan, dan kata-kata kotor, berfoya-foya dengan wanita lain dan mengabaikan anak-anaknya.

Kekerasan fisik yang dialami oleh responden berupa kata-kata kasar, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, mengambil keputusan sendiri, mengabaikan pasangan dengan pergi berfoya-foya dan suka keluar malam tanpa memperhatikan istri dan anak-anak. Bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh responden adalah berupa tamparan, memukul, menedang, mencekik, menuang air kopi panas, mengorok dengan parang, melempar barang. Dalam realitanya responden yang mengalami kekerasan fisik secara tidak langsung juga mengalami.¹³⁹

Hal ini disebabkan adanya pemahaman atau penafsiran Agama yang posisi suami mengontrol istri melalui ayat-ayat yang terkait dengan rumah tangga seperti makna *nuzyuz* dan *qawwam*. Ungkapan kaum laki-laki adalah *qawamun* bagi perempuan sebenarnya bermakna bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik, menjaga, dan membimbing istri agar melaksanakan *amar makruf nahi munkar* dan menunaikan kewajibannya

¹³⁹ A.hassan, *al-Furqan*, (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 1978), Cet.X, hal.70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah maupun kepada suami, dan penjagaan suami tersebut meliputi fisik dan moral.¹⁴⁰

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri sekaligus menunjukkan bahwa status dan kedudukan istri itu memang berada di bawah suami. Karena itu, berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka nuzyuz seharusnya tidak hanya diletakan kepada istri saja, namun juga terhadap suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 228, *para suami mempunyai derajat di atas para istri*. Ayat ini mengacu kepada pembagian tugas dalam keluarga, bukan menjelaskan kelebihan yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, penegasan bahwa para suami mempunyai derajat di atas para istri seperti ditugasi menjadi pemimpin rumah tangga (kepala keluarga).¹⁴¹

3. Meninggal istri

Menurut Hukum yang berlaku kewajiban suami adalah memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam rumah tangganya. Perbuatan meninggalkan istri tanpa alasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut dapat menjadi alasan bagi istri untuk melakukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

¹⁴⁰ Bachtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an*, Cet. I (TTP: Fa.Sumatra, TT). Hal

¹⁴¹ Muhammad Yunus, *Terjemahan al-Qur'anil-Karim*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), hal.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dilua kemampuannya.

Pada dasarnya meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah, akan mengakibatkan penelantaran semua kewajiban, kewajiban nafkah, kewajiban perlindungan, kewajiban rasa aman dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, perempuan yang sudah ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas, artinya suami sudah membiarkan istrinya terzolimi dan teraniaya tanpa status yang jelas. Istri yang mengambil sikap untuk keluar dari status yang tidak jelas adalah lebih bijaksana terhadap masa depan dirinya dan anak-anaknya. Sejalan dengan firman Allah dalm al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*¹⁴²

Dipahami dari ayat di atas bahwa sikap yang diambil oleh istri adalah untuk keluar dari melanggar hukum-hukum Allah, dalam hal ini suami yang meninggal istri jelas sudah tidak mnjalankan kewajibannya

¹⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darussunnah: 2019), hal. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai ketentuan Allah. Mengambil langkah bercerai artinya sudah mengeluarkan suami dari kezalimannya terhadap keluarga.¹⁴³

4. Media sosial (Handphone, WhatsApp, Facebook, dan Semacamnya)

Media sosial menjadi alasan di berkas perkara di Pengadilan Agama untuk melakukan perceraian. Tercatat bahwa pihak istri sering menemukan foto-foto mesra, chat/sms menggunakan kata-kata sayang didalam handphone milik suaminya, whatsapp, bahkan vidio berduaan dalam handphone suami dengan perempuan lain, ternyata ini sudah berkali di lakukan suami dan istri menemukan bukti.

Dari paparan data-data yang ada, dapat di lihat bahwa perempuan yang diselingkuhi oleh suaminya sudah berulang kali dilakukan oleh suaminya yang menemukan sms/chat, foto yang ada dalam handphone suaminya dan sering ketahuan lagi berbalas pesan di “WhatsApp” memanggil wanita tersebut dengan “sayang” dan mengucapkan “I love U”, dan begitu juga dengan suami yang menemukan bukti perselingkuhan istri dengan laki-laki lain menemukan foto-foto mesra di rumah kos laki-laki selingkuhanya dan foto-foto karaoke dengan selingkuhanya, sampai melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain dan mengirimkan foto tampak busana kepada laki-laki selingkuhanya tersebut dan bahkan ada yang sibuk main game online sehingga tidak memperdulikan anak-anaknya, bahkan sering kali Tergugat mengabaikan anak-anaknya yang sedang nangis karena sibuk main game melalui handphonenya bahkan tidak bisa lepas dari handphonenya.¹⁴⁴

¹⁴³ Muhammad Yunus, *op.cit.* hal. 50.

¹⁴⁴ Berkas perkara nomor, /Pdt.G/PA.Pbr. Dokumen PA tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemakaian media sosial untuk semua kalangan manusia hukum asal adalah boleh (Mubah), sejauh dalam pemakaiannya tersebut tidak ada yang ada memudhoratkan kaedah fiqhiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)." Berangkat dari kaedah tersebut. Kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menggunakan media sosial adalah tergantung pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka media sosial pun bernilai sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika media sosial digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita menggunakannya.

5. Pemabuk dan Narkoba

Dalam hal ini akan di paparkan data-data yang berkas perkara tentang keadaan rumah tangga mereka. Berdasarkan yang ada bahwa suami pemabuk, narkoba dan penjudi mengakibatkan cekcok dan pertengakaran dan KDRT, bahkan lebih jauh lagi perekonomian keluarga menjadi sulit. Dalam kasus ini perilaku tergugat sulit disembuhkan terbukti dari kenyataan bahwa meskipun sudah masuk penjara namun perilaku jelek tergugat juga tidak berubah.

Di pahami dalam kasus ini memang sudah cukup alasan untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana aturan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam daqn Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975, disebutkan bahwa

*“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya’.*¹⁴⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁵Data olahan 2020, *Dokumen Pengadilan Agama Pekanbaru*.hal.1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah cara atau jalan menuju sesuatu, metode merupakan kegiatan bersifat ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu yang menjadi subjek penelitian.¹⁴⁶ Menurut Zulkifli, metode merupakan cara yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah tersusun dalam kegiatan yang nyata dan praktis demi mencapai tujuan pembelajaran.¹⁴⁷ Adapun penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mencari asal usul sesuatu, kegiatan ini biasanya ada dan dilakukan oleh sebagian orang untuk mencari jawaban dari suatu masalah yang membutuhkan pembuktian serta asal usul dan latar belakang sesuatu yang dialaminya.¹⁴⁸

Metode penelitian secara umum disebut juga dengan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono¹⁴⁹, cara ilmiah adalah aktivitas penelitian yang didasarkan kepada ciri-ciri kelimuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia, empiris artinya cara yang dilakukan dalam penelitian bisa diamati oleh indra manusia, sedangkan sistematis adalah proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis.

¹⁴⁶ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 41

¹⁴⁷ Zulkifli, *Metodologi Pengajaran Bahasa Arab*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing: 2011), hal. 6

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 41

¹⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Darmadi,¹⁵⁰ metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian merupakan sistem yang mengatur ketat dalam menyelesaikan suatu yang dibuat secara sistematis, sedangkan metodologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari analisis berfikir, proses berfikir dan mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian.¹⁵¹ Maka dalam metode penelitian ada empat hal yang menjadi kata kunci antara lain cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁵² Dari beberapa uraian diatas maka penulis tarik kesimpulan metode penelitian adalah cara ilmiah yang ditempuh untuk memperoleh data untuk kegunaan dan tujuan tertentu.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan berkas perkara perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama kelas 1 A Kota Pekanbaru. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menyajikan sebuah gambaran yang menggambarkan perceraian yang

¹⁵⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 153

¹⁵¹ Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hal. 57.

¹⁵² Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, (Jakarta: dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 juni 2008, IKAHI), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Pekanbaru pada tahun 2020.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah asal muasal darimana data tersebut berasal¹⁵³, sedangkan menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, sumber data adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan metode pengumpulan data disamping jenis data yang sudah dibuat sebelumnya.¹⁵⁴ Maka penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan metode tepat untuk mengumpulkan data untuk mengetahui asal subjek data tersebut didapat. Sumber data terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Sumber data primer.

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵⁵ Sedangkan menurut Hasan, sumber data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh orang yang sedang melakukan penelitian atau yang sedang memerlukan data.¹⁵⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bersumber dari catatan hasil wawancara, hasil dari observasi lapangan dan hasil dari dokumentasi. Termasuk juga di dalamnya UU No

¹⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2013), hal. 172

¹⁵⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 142

¹⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 225

¹⁵⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal kemudian objek kajian hukum Islam tentang kekerasan fisik dalam keluarga.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan oleh orang yang sedang melakukan penelitian merupakan data yang sudah ada.¹⁵⁷ Adapun menurut Sugiyono, Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di dapat oleh orang yang sedang melakukan penelitian. Sumber data sekunder disebut juga data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁵⁸. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahkan sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁵⁹ Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hukum serta kitab-kitab Fiqh yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Hukum dan Fiqh serta Ensiklopedia Hukum Islam.¹⁶⁰

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 58

¹⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1978), hal. 93

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, hlm. 13

¹⁶⁰ *Ibid*. hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik pengumpulan data

Guna memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku, internet, data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru kelas 1 A, dan sumber referensi yang relevan terkait masalah yang akan diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan ini dapat memperkuat argumentasi dan analisis penelitian.
2. Studi lapangan yaitu mengadakan penelitian ke lokasi untuk mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian lapangan ini menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi partisipatif

Menurut Widoyoko, observasi merupakan upaya pengamatan dan pencatatan yang sistematis kepada unsur-unsur yang nampak dalam gejala pada objek yang sedang diteliti.¹⁶¹ Observasi merupakan upaya penelitian dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.¹⁶² Dengan demikian, penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan observasi adalah penelitian dengan pengamatan dari berbagai sumber secara langsung maupun tidak langsung yang muncul pada gejala pada objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat

¹⁶¹ Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 46

¹⁶² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung dalam kehidupan orang yang diobservasi. Peneliti mengamati masyarakat yang hadir dalam persidangan perceraian.

b. Wawancara.

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁶³ Penulis menyimpulkan pengertian wawancara adalah metode mendapatkan data dengan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab. Wawancara merupakan usaha untuk menggali keterangan lebih mendalam dari sumber terkait melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan metode wawancara dengan mewawancarai seorang Panitera Muda bapak Fakhriadi SH. MH selaku pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru

c. Analisis Dokumen

Menurut Sugiyono, Dokumentasi merupakan satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengkaji sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, gambar, laporan dan lain sebagainya.¹⁶⁴ Sedangkan menurut Gootshalk membagi pengertian dokumentasi menjadi dua yaitu sumber tertulis bagi informasi sejarah, artefak maupun lukisan dan kedua, dokumentasi diperuntukkan untuk surat menyurat resmi kenegaraan seperti perjanjian, undang-undang hibah

¹⁶³ *Lop. Cit*, hal. 213

¹⁶⁴ *Op. Cit*, hal. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain sebagainya.¹⁶⁵ Maka penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda, gambar-gambar atau dokumen penting dan lain sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan, berkas penelusuran perkara dan arsip Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengatur urutan data lalu mengorganisasikannya menjadi satu pola, mengkategorikan masing-masing data lalu menyusunnya secara sistematis.¹⁶⁶ Tujuannya untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengumpulan Data

Upaya mencari semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, langkah ini dapat diambil dari proses wawancara, observasi maupun penelusuran dokumen-dokumen pendukung seperti berkas perkara, buku-buku penunjang penelitian maupun sumber-sumber lainnya berupa karya ilmiah, internet, jurnal-jurnal. Data yang sudah terkumpul kemudian dituliskan untuk dipilah-pilah.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis yang menggolongkan data kedalam beberapa kategori, dimulai dengan proses pemilihan, pemusatan

¹⁶⁵ *Op. Cit*, hal. 146

¹⁶⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 244

data dan disederhanakan dengan membuang data-data yang dianggap tidak berkaitan dengan bahan penelitian, pengabstarakan lalu muncullah transformasi data melalui catatan-catatan. Reduksi data diharapkan dapat memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Transformasi data yang sudah didapat kemudian dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat. Proses ini merupakan proses penulisan data-data yang sudah dipilih baik berupa tulisan biasa, gambar, tabel, grafik dan lain sebagainya yang terstruktur sesuai kaidah penulisan karya ilmiah dan sudah mewakili semua proses penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam penelitian, dalam kesimpulan sudah ditemukan temuan terbaru tentang penelitian yang menjawab semua rumusan masalah, temuan tersebut bisa berbentuk deskripsi yang awalnya masih hal yang meragukan dan sudah menjadi jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai kasus perceraian yang diakibatkan konflik yang muncul berasal dari anggota keluarga seperti suami yang tidak mencukupi nafkah keluarga, suami pengangguran, suami narapidana, ikut campur pihak keluarga lain, adanya orang ketiga dalam keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, sehingga muncul kesenjangan yang memunculkan percekocan, kekerasan dan berujung pada perceraian dan hakim mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dilatarbelakangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ayat al-Qur'an serta hadits yang menjadi bukti dan mengatur batasan kekerasan dalam Islam.
3. Dalam perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr, melalui proses panjang dan banyak pertimbangan maka hakim memutuskan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjatuhkan talak ba'in sugra terhadap tergugat.
- b. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebanyak Rp. 338.000 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu).

Menjatuhkan putusan tersebut tentu saja dengan pertimbangan Undang-undang dan hukum Islam.

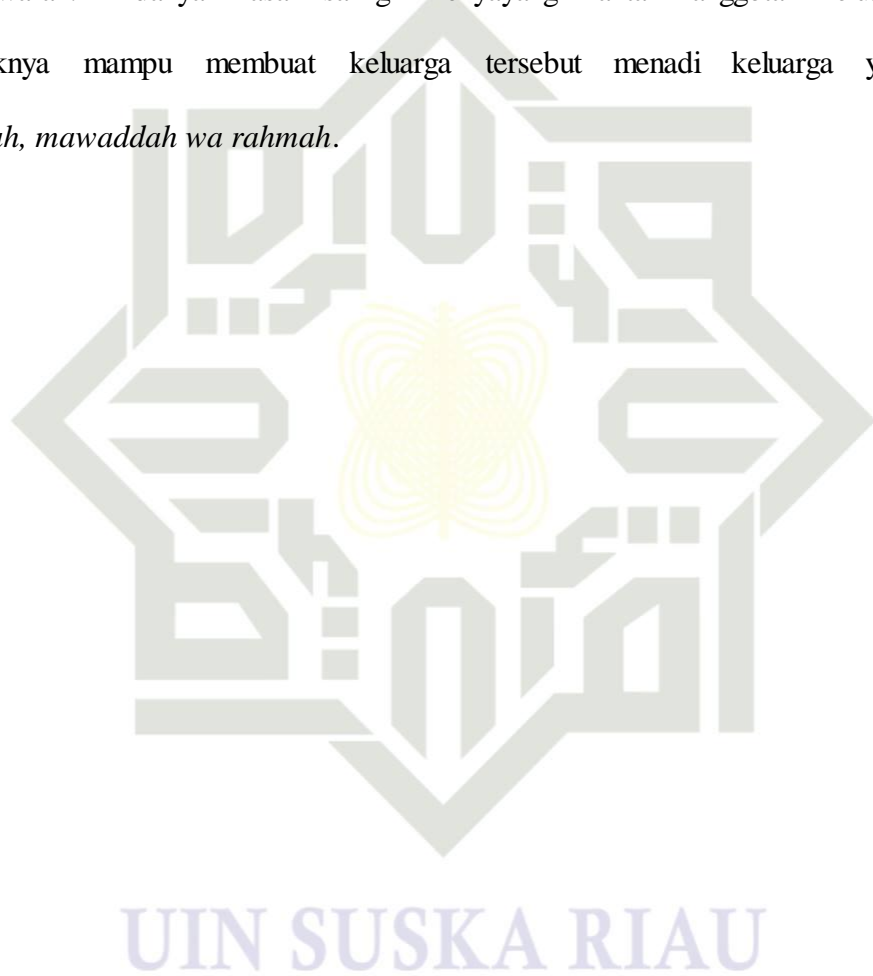
Setelah menganalisis putusan perkara nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Pbr, maka benar hakim mengacu kepada Undang-undang dan hukum Islam, misalnya memanggil penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 26 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam menjatuhkan hak asuh anak sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan mengutip hadits Ahmad, at-Tirmidzi dan Hakim serta pendapat Prof. Dr . Wahbah Azzuhaili dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu.

B. SARAN

Bagi para pengambil kebijakan, hendaknya lebih teliti dalam mengambil keputusan, melihat dan menimbang kembali tingkat kekerasan yang terjadi serta berlaku adil tanpa memandang status serta kedudukan pelaku maupun korban, memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap korban, hal ini bertujuan agar timbulnya efek jera bagi para pelaku tindak kekerasan.

Pasangan suami istri hendaknya dalam kehidupan berumah tangga harus saling menghormati dan saling bekerja sama dalam semua hal, agar

tidak terjadinya ketimpangan dalam keluarga yang mengakibatkan masalah yang berkepanjangan. Suami istri memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dan selalu mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Adanya rasa saling menyayangi antar anggota keluarga hendaknya mampu membuat keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Abidin, Ibnu. *Raad al-Mukhtar*, Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*, cet I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad,Beni. *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Marom Min Jam 'I Adillatul Ahkam*, Qahirah: Darul Hadist, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar El Fikr, 1994.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'a*, Beirut Libanon: Dar ihya al-Turas al-Arabi, Jilid 4.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Kairo: Dar Fikr.
- Alkhidmat, Hendra *Psikologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Ma'bari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in*, Beirut: Al-Jaffan wa Al-Jabi & Dar Ibni Hazm, 2004.
- Al-marbawi, Muhammad Idris *Kamus Al-Marbawi*, Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj Abu Hasan. *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Dar al-Ihya.
- Al-Sijistani, Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiah, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Arto, Mukri. *Praktik Perkara pada Peradilan Agama*, Cetakan. IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- ash-Shiddiqy, T. M. Hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H. cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- as-Syafi'i, Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni. *Kifayatul Akhyar*, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Terj. Abdul ghafar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azhary, M. Tahir. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI, 1982.
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta:Gema Insani, 2011
- Chik Hasan Bisri, MS. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989.
- Dahlan, Sudjari. *Sudut Pandang Rancangan KUHP*, Surabaya: 2001.
- Daud, Imam Abu. *Shahih Sunan Abu Daud Jilid II*, Yogyakarta: Pustaka Azzam, t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesian*, Cet VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Djannah, Fathul *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Dra. Norkasiani dkk, *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Renika Cipta , 2006.
- Hirdawaty, Linda. *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia Fakultas Syari''ah Institut Agama Islam Negeri, Raden Intan Lampung*, 2017.
- Khazaly, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat*, cet I. Bogor: Kencana, 2003.
- Khalim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamid, Zamri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Bina Cipta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

- Harahap, M.Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Hasan, Abbas. *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, Pekanbaru: t.p, 1995
- Hassan, *al-Furqan*, Jakarta:Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 1978.
- Helmi, Muhammad Ishar. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hendrati et al, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik dan Struktural*, Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz VII, hlm. 573.
- Ismail, Suheri Sidik. *Ketentraman Suami Istri*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Ismiati, Saptosi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Ka'bah, Rifyal. *Permasalahan Perkawinan*, Jakarta: dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Katief, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lubis et al, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro, Wanita dan Perkembangan Reproduksinya ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Zein, Satria Efendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mahmud, Nabil. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Karama Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Makara, Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marlia, Milda. *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. LKIS, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Miharja, Marjan. *Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia*, Pasuruan, Qiara Media, 2019.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet. ke-11, Jakarta: lentera, 2004.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana (Komentari Atas Pasal-pasal Penting dalam KUHP)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rohman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an*.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib. Jakarta: PT. Al-Ma'arif, Jilid 6, 1980.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh Sunnah*, Mesir : Dar at – Taufiqiyah litturots, t.th.
- Salim, Hadiyah *Wanita Islam: Keprubadian dan Perjuangannya*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2008.
- Shihab, Quraish. *Kesetaraan Gender dalam Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ss, Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010..
- Sulaikin Lubis et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Surin, Bachtiar. *Terjemahan dan Tafsir al-Qur'an*, Cet. I TTP: Fa.Sumatra, TT.
- Sutedi, Adrian. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamam, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Warson A-Imunawir, Ahmad. *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Yunus, Muhammad. *Terjemahan al-Qur'anil-Karim*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1984.

Sumber Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi dan Jurnal Ilmiah

Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi," Vol.7, No. 2 Desember 2016.

Fitriayah Wardie Murdani, *Kewajiban dan Hak Suami Istri dalam Keluarga Islam*, dalam Al-Insan, NO. 3, Vol. 2, Tahun 2006 Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al- Insa, 2006.

Yusar, (selaku Wakil Ketua), *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 18 April 2019.

Pasal 2 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara yang diterima dan perkara diputus pada Tahun 2018 dan 2017. Jl.Parit Indah.

Laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru tahun 2018.

Ridwan, M. Khoiri. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (analisis ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan hadist tentang nushuz). Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang",

<http://etheses.uin-malang.ac.id/3176/1/13780011.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/21296/2/Abstrak.pdf>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2,

Sumber Internet dan Berita Harian

<https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2019/berkas2019/laptah%202018.pdf>

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*.

Makamah Agung, 25 Oktober 1969, No. 391 K/Sip/1969, J.I. Pen. I/70.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen kantor Wilayah Provinsi Jawa barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT
 ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Nur Zabiah

Nomor ID : 21890225369

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 28 Agustus 1995

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

56 : الاستماع

55 : القواعد

55 : القراءة

553 : النتيجة

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahyudin Syukri, M. Ag
 The Head of Language Development Center



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقيّة اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكوومية الإسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nur Zabiah
ID Number : 21890225369
Date of Birth : Agustus 28, 1995
Sex : Female

Test Form : Paper Based Test
Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 54
Structure & Written Expressions : 63
Reading Comprehension : 38
Overall Score : 517

Expire Date : February 19, 2021



English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of Sultan Syarif Kasim Riau
The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858812
Email: info@pusat-bahasa.info pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: NUR ZABIAH
NIM	: 21890225369
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: DR. ZULKAYANDRI . MA
PEMBIMBING II / CO-PROMOTOR	: DR. AZNI . MA
JUDUL TESIS/DISERTASI	:
	:
	:

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	Senin, 11 Jan '21	Proposal	<i>[Signature]</i>	
2.	Rabu, 27 / Jan '21	Bab I pendahuluan	<i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 10 Feb '21	Bimbingan Bab II	<i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 25 Feb '21	Konsultasi Abstrak	<i>[Signature]</i>	
5.	Senin, 1 Maret '21	Bimbingan bab I - V & Daftar pustaka.	<i>[Signature]</i>	
6.	Selasa, 9 Maret 2021	Ace	<i>[Signature]</i>	

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 09 - 03 - 2021

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	12 Maret 2021	Penyerahan surat + bimbingan Bab I		
2.	15 Maret 2021	Bimbingan bab II		
3.	22 Maret 2021	Bimbingan Bab III		
4.	30 Maret 2021	Bimbingan Bab IV - V & Daftar pustaka.		
5.	7 April 2021	Perbaikan Daftar Isi		
6.	8 April 2021	Ace.		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 8 - April - 2021

Pembimbing II / Co Promotor*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR ZABIAH, lahir di Kampung Salak, 28 Agustus 1995,. Penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar 019 Salak dan lulus pada tahun 2006, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tanawiyah Pondok Pesantren Ahmadul Jariyah Utama Kota Pinang, Labuha batu Selatan, Sumatra Utara. Selanjutnya menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2013. Setamatnya dari Madrasah Aliyah, penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Fakultas Dakwan dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

Setelah menyelesaikan program S1, penuls mengabdikan diri di Pesantren Asalnya sebagai tenaga pendidik sampai sekarang. Februari 2018 penulis melanjutkan pendidikan Strata S2 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga (HK) dalam proses ujian tesis dengan judul “KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT PASAL 1 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Tahun 2020)”